



**PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI ANAK JALANAN DI LINGKUNGAN  
PONDOK SOSIAL (LIPOSOS) KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2012**



**SKRIPSI**

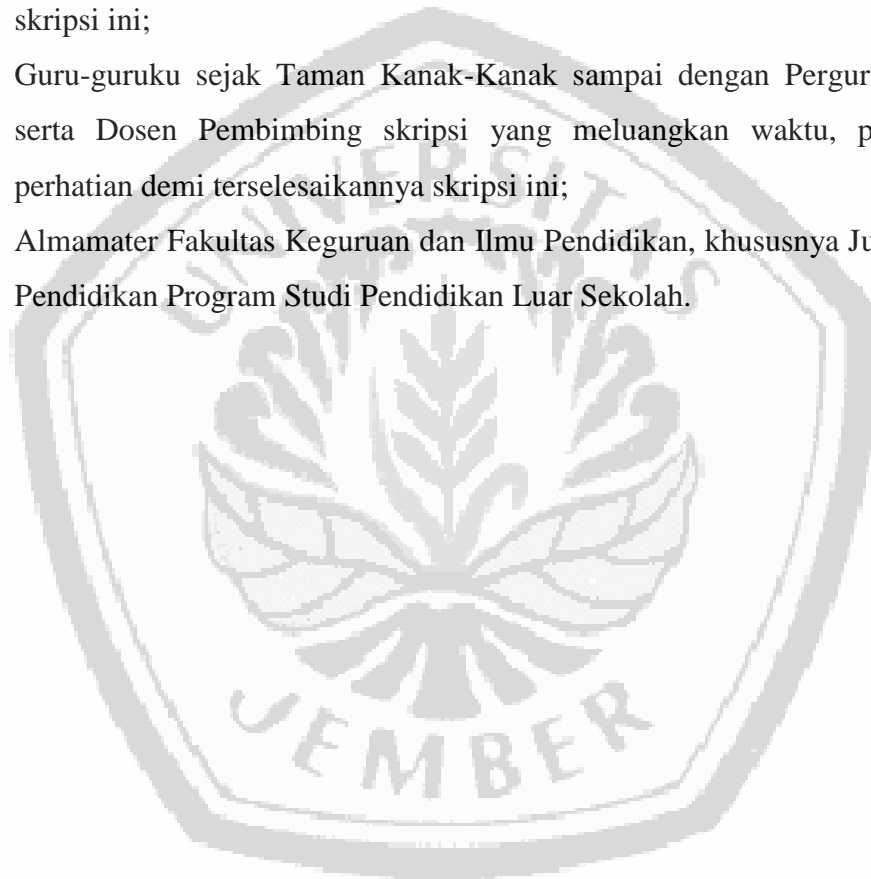
**Oleh  
ZAINUL FATAH  
NIM : 060210201318**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2013**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Semoga untaian kata dalam karya tulis ini menjadi persembahan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan rasa terima kasih saya kepada :

1. Ayah dan ibuku tercinta yaitu Bapak Sutipyan dan juga Ibu Sittiyah yang telah membimbing, memberikan dorongan dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi serta Dosen Pembimbing skripsi yang meluangkan waktu, pikiran dan perhatian demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah.



## MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

11. bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

[767] Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat ini ialah Malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah.

[768] Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran.

## PERNYATAAN

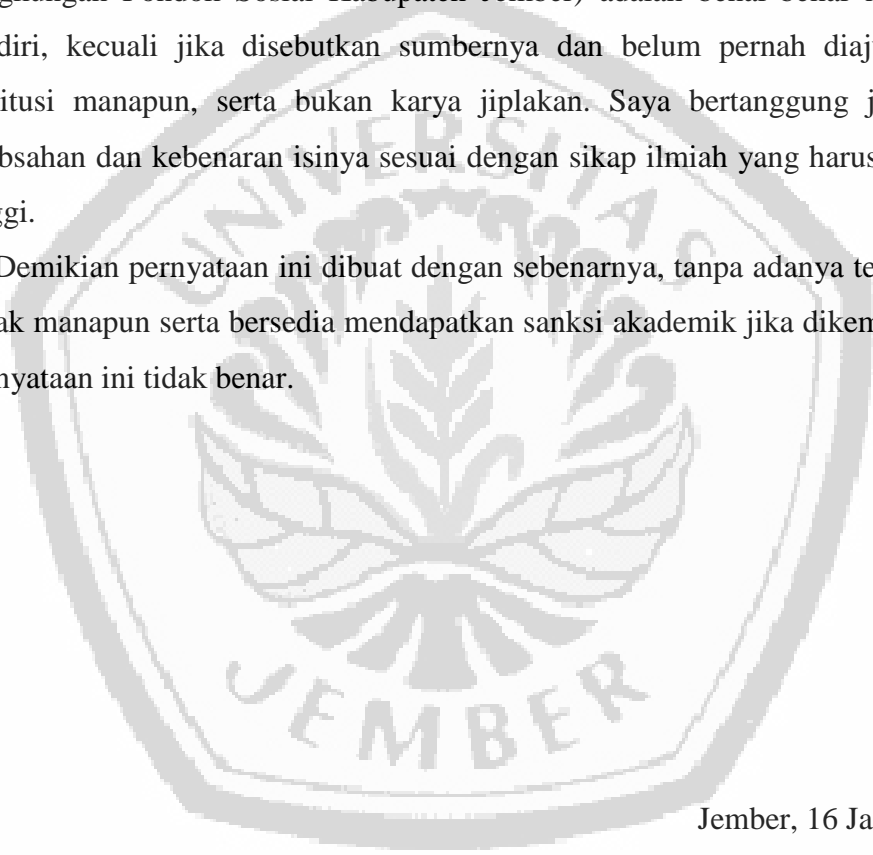
Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Zainul Fatah

Nim : 060210201318

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan LIPOSOS (Studi Deskriptif di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.



Jember, 16 Januari 2013

Yang menyatakan,

Zainul Fatah  
NIM. 060210201318

## **PENGAJUAN**

### **PENDIDIKAN NONFORMAL BAGI ANAK JALANAN DI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL (LIPOSOS) KABUPATEN JEMBER TAHUN 2012**

#### **SKRIPSI**

disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu (S1) program studi Pendidikan Luar Sekolah jurusan Ilmu Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Oleh

Nama : Zainul Fatah  
NIM : 060210201318  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan, 14 Oktober 1986  
Jurusan/Program : Ilmu Pendidikan/Pendidikan Luar Sekolah

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Ahmad Zein, M.Pd  
NIP. 195203031980021001

Prof. Dr. H. Sulthon Masyhud, M.Pd  
NIP. 195909041981031005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember Tahun 2012" telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Januari 2013

Tempat : Ruang Ujian Ilmu Pendidikan Gedung 3 FKIP

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. H. Anwar Rozaq, MS  
NIP. 19471113 197903 1 001

Prof. Dr. H. Sulthon Masyhud, M.Pd  
NIP. 195909041981031005

Anggota I

Anggota II

Drs. H. Ahmad Zein, M.Pd  
NIP. 195203031980021001

Dr. Nanik Yuliati, M.Pd  
NIP. 196107291988022001

Mengesahkan  
Dekan,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd  
NIP. 195405011983031005

## RINGKASAN

**Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial (studi deskriptif di Liposos Kabupaten Jember tahun 2012)** Zainul Fatah, Nim 060210201318, Tahun 2012; 90 halaman; Program Studi Pendidikan Luar sekolah, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember

Liposos adalah lingkungan pondok sosial, merupakan tempat penampungan atau tempat tinggal bagi para penghuni yang memiliki latar belakang dari pengemis, anak jalanan dan gelandangan. Penghuni liposos dalam pemenuhan hidupnya tidak berusaha sendiri dan mengandalkan bantuan dari dinas sosial. Sehingga dari Liposos perlu mengadakan suatu pelatihan dan bagaimanakah pelaksanaan pendidikan nonformal bagi Anak Jalanan di Liposos Kabupaten Jember tahun 2012, dan juga kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak jalanan di Liposos Kabupaten Jember tahun 2012.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan pendidikan nonformal bagi anak jalanan. Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai suatu bentuk penanganan dan pemberdayaan .

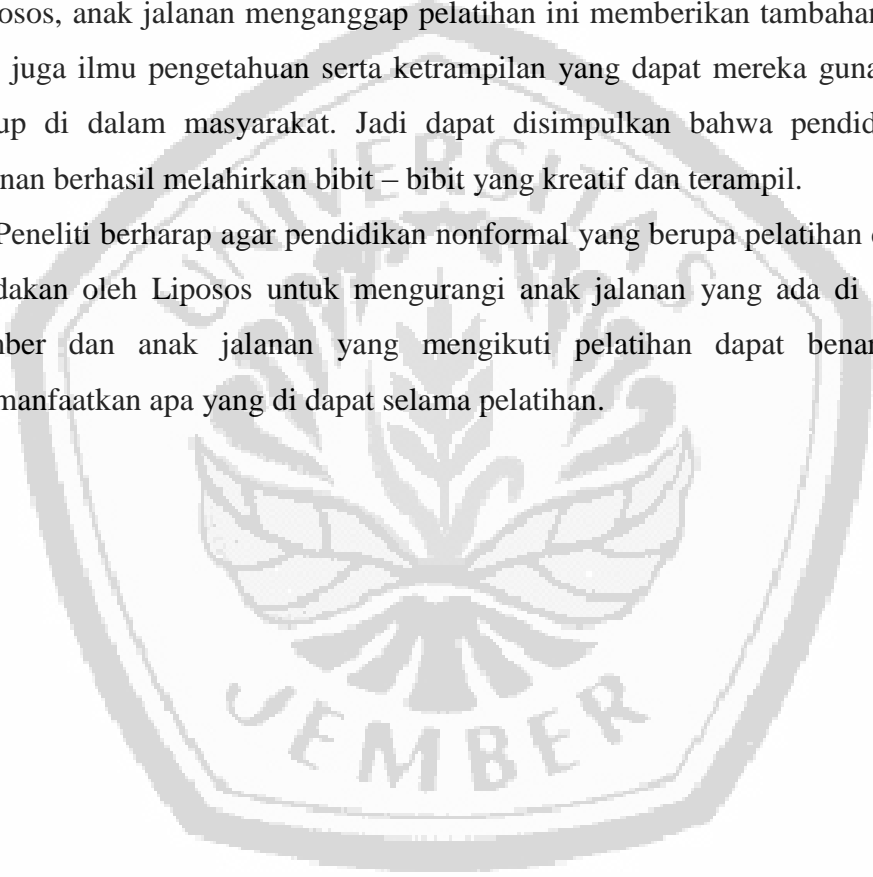
Penelitian dilakukan di Liposos jalan Tawes no 203 Kabupaten Jember, dengan pertimbangan, di situ ada upaya pendidikan nonformal bagi anak jalanan. Berdasarkan dengan hal itu ditemukan data yang relevan untuk mengetahui pendidikan bagi anak jalanan liposos. Pengumpulan sumber data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis pengumpulan sumber data tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran atau masalah yang ada di Liposos.

Metode penentuan informan dengan menggunakan metode purposive dengan melibatkan informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci di sini adalah yang bertanggung jawab di liposos. (Kepala UPT LIPOSOS) dan juga kepala dinas sosial (dinsos) sedangkan informan pendukung adalah anak jalanan

yang berada di liposos dan penghuni liposos sebelumnya. Data yang sudah terkumpul berupa ungkapan - ungkapan yang telah disampaikan oleh informan kepada penulis yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan data tentang pendidikan anak jalanan, sehingga memperoleh data sesuai dengan judul.

Hasil penelitian pada anak jalanan yang menghuni Liposos menunjukkan bahwa anak jalanan begitu antusias dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Liposos, anak jalanan menganggap pelatihan ini memberikan tambahan wawasan dan juga ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang dapat mereka gunakan untuk hidup di dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak jalanan berhasil melahirkan bibit – bibit yang kreatif dan terampil.

Peneliti berharap agar pendidikan nonformal yang berupa pelatihan dapat terus diadakan oleh Liposos untuk mengurangi anak jalanan yang ada di Kabupaten Jember dan anak jalanan yang mengikuti pelatihan dapat benar – benar memanfaatkan apa yang di dapat selama pelatihan.





## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember Tahun 2012”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

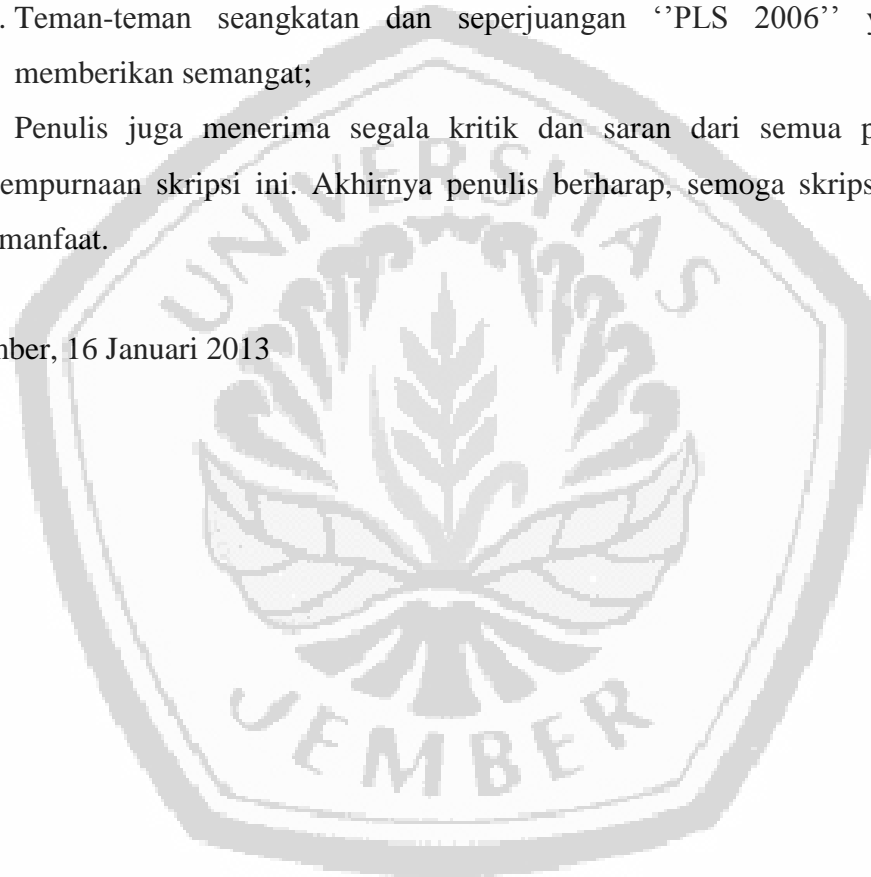
1. Drs. Mohammad Hasan, M.Sc. Ph.D selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Nanik Yuliati, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Drs. H. AT. Hendrawijaya, SH. M.Kes selaku Ketua Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sekaligus;
5. Drs. H. Ahmad Zein, M.Pd selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Prof. Dr. H. Sulthon Masyhud, M.Pd selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
7. Drs. Anwar Rozaq MS selaku ketua tim penguji yang turut memberikan kritik maupun saran terhadap skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Dosen Pendidikan Luar Sekolah serta seluruh staf karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
9. Kepala Dinas Sosial dan juga Kepala UPT Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember;

10. Tutor dan Staf Karyawan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.
11. Ayah dan ibuku tercinta yaitu Bapak Sutipyan dan Ibu Sittiyah yang telah membimbing, memberikan dorongan dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
12. Tri Susanti Dwioktaviana yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
13. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan ‘‘PLS 2006’’ yang telah memberikan semangat;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Januari 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

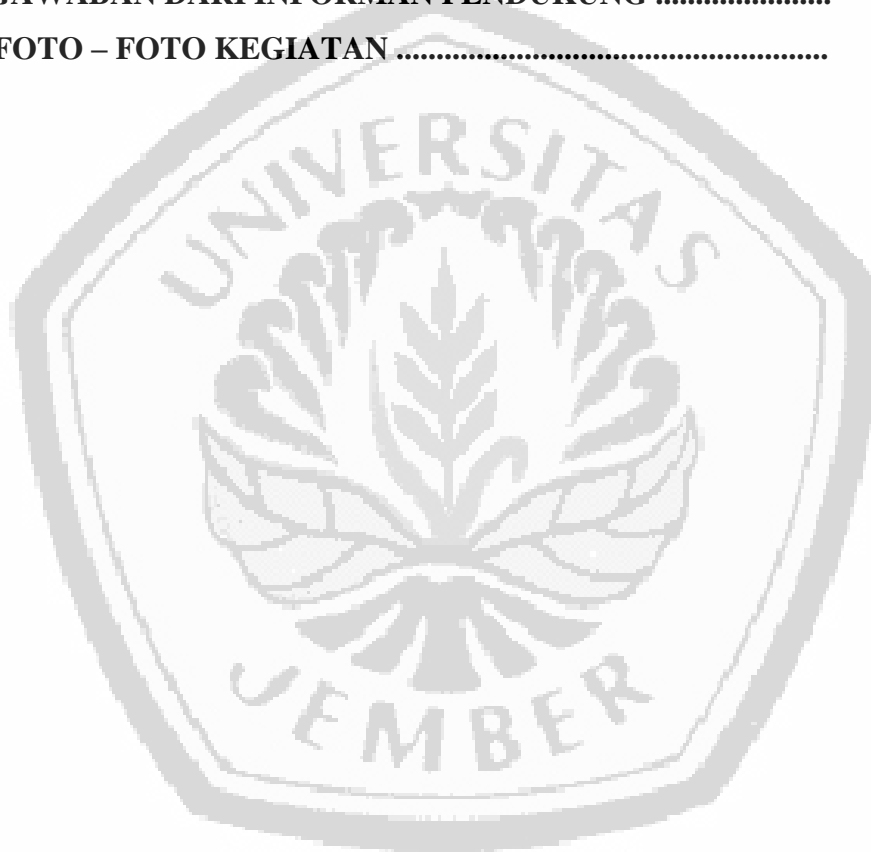
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Pendidikan .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Anak Jalanan .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4 Sepuluh Patokan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) ..</b>	<b>13</b>
<b>2.5 Pelaksanaan Pendidikan Anak Jalanan (Pendidikan         Nonformal ) .....</b>	<b>17</b>
<b>2.6 Kaitan Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>24</b>
<b>2.7 Kerangka Berfikir Peneliti Bagi Anak Jalanan .....</b>	<b>26</b>
<b>2.8 Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS)</b>	<b>38</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>3.2 Penentuan Informan Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>3.3 Definisi Operasional .....</b>	<b>45</b>
3.3.1 Pendidikan .....	45

3.3.2 Pendidikan Nonformal .....	45
3.3.4 Anak Jalanan .....	46
3.3.5 Tujuan .....	47
3.3.6 Manfaat .....	48
3.3.7 Penerapan Fungsi Manajemen .....	49
3.3.8 Pengembangan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan.....	50
<b>3.4 Rancangan Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>3.5 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>51</b>
3.5.1 Metode Wawancara .....	52
3.5.2 Metode Observasi .....	52
3.5.3 Metode Dokumentasi .....	53
<b>3.6 Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....</b>	<b>54</b>
3.6.1 Pengolahan Data .....	54
3.6.2 Analisis Data .....	55
<b>BAB 4. PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember .....</b>	<b>57</b>
4.1.1 Sejarah berdirinya LIPOSOS .....	57
<b>4.2 Profil Liposos (Lingkungan Pondok Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Jember .....</b>	<b>58</b>
4.2.1 Mengenal Liposos .....	58
4.2.2 Kedudukan, Tujuan Dan Fungsi .....	59
4.2.3 Kondisi Sarana Prasarana .....	59
4.2.4 Visi Dan Misi Dinas Sosial .....	61
4.2.5 Kondisi Penduduk Kabupaten Jember .....	61
4.2.6 Tingkat Pendidikan .....	61
4.2.7 Perekonomian .....	62
4.2.8 Dinas Sosial Kabupaten Jember .....	62
4.2.9 Uraian Tugas Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Jember (Sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 ) .....	64

4.2.10 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember..	66
4.2.11 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	67
<b>4.3 Keadaan Penghuni Liposos .....</b>	<b>67</b>
4.3.1 Jumlah Penghuni Menurut Daerah Asal .....	67
4.3.2 Penghuni Liposos Mernurut Faktor Penyebab	
Masuk Liposos .....	69
4.3.3 Penghuni Liposos Menurut Umur .....	69
4.3.4 Jumlah Penghuni Liposos Menurut Jenis Kelamin.....	70
4.3.5 Penghuni Liposos Menurut Tingkat Pendidikan .....	71
<b>4.4 Karakteristik Informan .....</b>	<b>73</b>
4.4.1 Penentuan Informan .....	73
<b>4.5 Pengolahan Data dan Analisis Data .....</b>	<b>73</b>
4.5.1 Sumber Belajar .....	73
4.5.2 Warga Belajar .....	76
4.5.3 Panti Belajar .....	78
4.5.4 Ragi Belajar .....	78
4.5.5 Dana Belajar .....	79
4.5.6 Kelompok Belajar .....	79
4.5.7 Program Belajar .....	79
4.5.8 Proses Belajar .....	80
4.5.9 Hasil Belajar .....	80
4.5.10 Evaluasi Belajar .....	82
<b>4.6 Hambatan / Kendala Anak Jalanan .....</b>	<b>83</b>
4.6.1 Kendala Bagi Anak Jalanan.....	83
4.6.2 Kendala Bagi Lembaga .....	83
<b>BAB 5. PENUTUP</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>A</b> MATRIK PENELITIAN .....	<b>90</b>
<b>B</b> DENAH LOKASI LIPOSOS .....	<b>91</b>
<b>C</b> INSTRUMEN PENELITIAN .....	<b>92</b>
<b>D</b> PEDOMAN WAWANCARA .....	<b>94</b>
<b>E</b> JAWABAN DARI INFORMAN PENDUKUNG .....	<b>96</b>
<b>F</b> FOTO – FOTO KEGIATAN .....	<b>99</b>



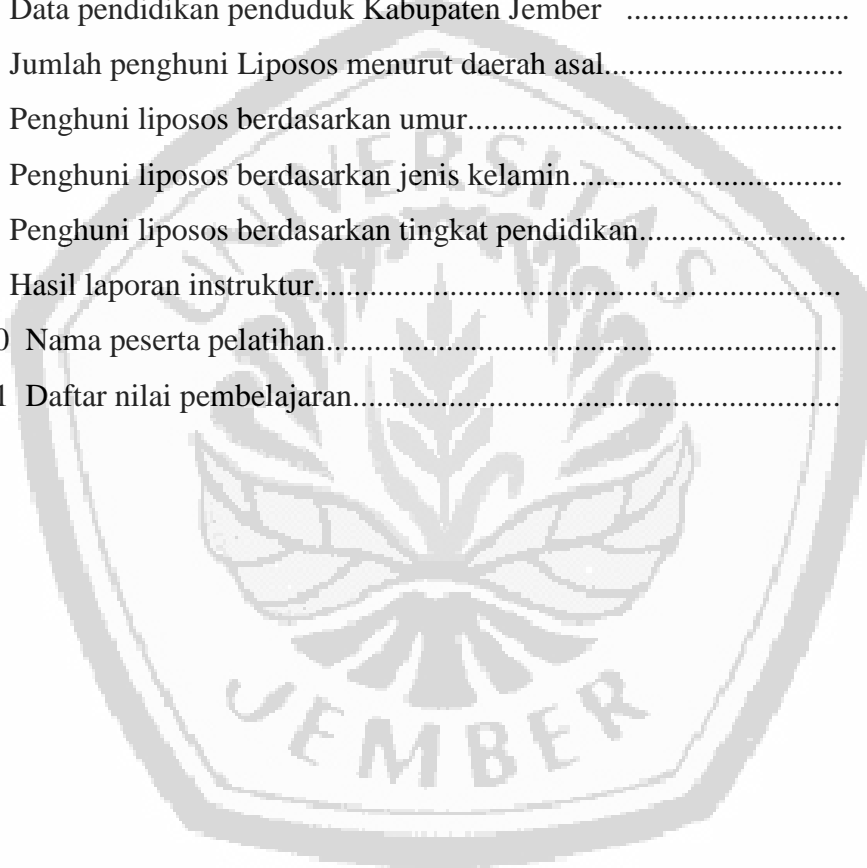
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.7. Kerangka Pemikiran Peneliti .....	26



## DAFTAR TABEL

Data	Halaman
4.1 Kondisi sarana dan prasarana di Liposos .....	56
4.2 Data Pegawai di Dinas Sosial dan Liposos.....	47
4.2 Pegawai menurut golongan.....	47
4.3 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	47
4.4 Data pendidikan penduduk Kabupaten Jember .....	59
4.5 Jumlah penghuni Liposos menurut daerah asal.....	65
4.6 Penghuni liposos berdasarkan umur.....	67
4.7 Penghuni liposos berdasarkan jenis kelamin.....	68
4.8 Penghuni liposos berdasarkan tingkat pendidikan.....	69
4.9 Hasil laporan instruktur.....	72
4.10 Nama peserta pelatihan.....	75
4.11 Daftar nilai pembelajaran.....	79





## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (1), Ayat (1) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, msyarakat, bangsa dan negara.

Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal (1), Ayat (12) pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Keadaan kota dapat mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermsyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak–anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

Di antara anak–anak jalanan, sebagian ada yang sering berpindah antar kota. Mereka tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Seorang anak yang terhempas dari keluarganya, lantas menjadi anak jalanan disebabkan oleh banyak hal. Penganiayaan kepada anak merupakan penyebab utama anak menjadi anak jalanan. Penganiayaan itu meliputi mental dan fisik mereka. Lain dari pada itu, pada umumnya anak jalanan dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah.

Sebenarnya masih banyak cara yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran bagi anak jalanan, yang biasa pekerjaannya mengais nafkah dijalan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari. Salah satunya yaitu

dengan cara memberikan atau melaksanakan pendidikan anak jalanan yang disebut juga dengan pendidikan nonformal di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), sebagai tempat kegiatan untuk mencegah munculnya masalah sosial anak jalanan yang masih belum mendapatkan pendidikan, seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan.

Selain itu, faktor-faktor yang mendorong anak hidup dijalanan menurut Bastian dalam Biana ( 2005 : 9-10 ).

a. Faktor Ekonomi

Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin diakibatkan rumah mereka dirobohkan dan akhirnya mereka tinggal di daerah sebelumnya/daerah kumuh perkotaan dan juga anak-anak yang berasal dari desa yang sengaja dikirim ke kota oleh orang tuanya untuk mencari uang.

b. Faktor Keluarga

Adanya ketidak cocokan antara anak dengan orang tua sehingga dapat menimbulkan konflik dan perlakuan salah/kekerasan sehingga anak lari ke jalanan untuk mencari pelampiasan. Selain itu anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga jalanan, besar kemungkinan anak akan mengikuti jejak orang tuanya.

b. Faktor Lingkungan

Jika anak itu dekat dengan komunitas jalanan, baik sebagai teman bermain ataupun dekat dengan tempat dimana komunitas jalanan itu beroperasi. Selain itu dekat dengan keramaian yaitu terminal angkutan kota ataupun luar kota, tempat perbelanjaan, disekitar lampu lalu lintas karena sangat memungkinkan bagi mereka untuk mengais rejeki versi anak jalanan.

Penelitian pendidikan anak jalanan berupaya mendapatkan suatu karakteristik anak jalanan yang setidaknya dapat memberi gambaran tentang pentingnya pendidikan nonformal bagi anak jalanan kepada kami tentang permasalahan sehari-hari yang dihadapi anak jalanan di lembaga sosial yaitu Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS), kondisi keluarganya, aspirasi mereka serta ikut memikirkan pendidikannya guna mengatasi masalah mereka.

Margono (2004:15) bahwa masalah pendidikan sangat kompleks dan luas ruang lingkupnya, usaha ke arah mencari jawaban dari bermacam – macam problema pendidikan harus tetap digalakkan pembaruan dan pengembangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Sehubungan dengan hal di atas, di perguruan tinggi, khususnya, terus dilaksanakan kegiatan – kegiatan penelitian sebagai pelaksanaan dari Tri Dharma perguruan tinggi. Di kalangan mahasiswa juga tidak mau ketinggalan. Kegiatan penelitian, yang disebut penelitian *institutional* diajarkan kepada para mahasiswa.

Marzuki (2010:214) pendidikan dengan segala permasalahannya tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan masalah-masalah di luar sektor pendidikan. Sebagai institusi masyarakat, pendidikan tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat dan lingkungannya dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan masyarakat setempat. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh tersebut, antara lain adalah administrasi pemerintah daerah, demografi, sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Salah satu dari lima masalah yang belum teratasi secara baik adalah kurangnya pembinaan pendidikan luar sekolah, program pemerintah daerah (Propeda, 2002).

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal bagi anak jalanan merupakan masalah yang kompleks sehingga harus mengalami pembaruan dan pengembangan. Dan masalah tersebut merupakan masalah bersama, oleh karena itu semua aspek masyarakat harus ikut turut andil dalam penyelesaian masalah tersebut.

Untuk membahas peranan PLS dalam mengatasi masalah migran perkotaan, ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, harus berpikir bahwa pendidikan bukan hanya sebatas sebagai salah satu sektor pembangunan, melainkan harus dipandang sebagai unsur yang mencakup semua elemen yang harus dipadukan, baik secara vertical maupun horizontal, ke dalam seluruh upaya pembangunan. World Bank (1980) menyatakan bahwa pendidikan harus dipandang sebagai konteks interdisiplin sebagai factor pembangunan yang multidimensional di mana manusia sebagai tujuan factor pembangunan yang

intrumental. Konsekuensinya adalah bahwa, di samping konvensional seperti sekolah, pendidikan harus dilakukan sepanjang jaja manusia, meliputi semua lapisan masyarakat sebagai kelompok, dilaksanakan sewaktu-waktu diperlukan, bersifat fleksibel, dan kontennya sesuai dengan kebutuhan klien (sasaran didik), siap mengatasi masalah setempat, dan dengan metode dan teknik sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat khususnya orang dewasa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menurut Suharsini Arikunto (2006:30) bahwa masalah penelitian adalah sebuah langkah awal suatu kegiatan penelitian. Bagi orang yang belum berpengalaman meneliti, menentukan atau memilih masalah bukanlah pekerjaan yang mudah bahkan boleh dikatakan sulit. Sedangkan menurut Sulthon Masyhud (2001:17) masalah penelitian merupakan titik tolak dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Artinya kegiatan penelitian dapat dilaksanakan apabila ada masalah yang harus diselesaikan. Dari mana masalah itu diperoleh? Yang jelas mesti merupakan kebutuhan seseorang untuk dipecahkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial ( LIPOSOS) Kabupaten Jember Tahun 2010?**
- b. faktor-faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Tujuannya yaitu untuk “mendeskripsikan” bagaimana pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak jalanan dilingkungan pondok sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.
- b. Tujuannya yaitu Untuk “mendeskripsikan” faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak jalanan di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

- 1). Dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan, sikap, nilai nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan di masa depan
- 2). Membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan nonformal

### **b. Bagi Perguruan Tinggi**

Dapat mengamalkan tri dharma perguruan tinggi (Darma penelitian) sekaligus menunjukkan eksistensi universitas dalam bidang pendidikan. Dan juga peningkatan wawasan keilmuan berkaitan dengan pendidikan Nonformal

### **c. Bagi Program Studi PLS**

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengembangan dan perluasan berkenaan dengan wawasan keilmuan PLS serta menunjukkan eksistensi PLS ke dunia luar.

### **d. Bagi penyelenggara pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan (LIPOSOS)**

Hasil penelitian ini akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan evaluasi diri program pendidikan Nonformal yang sudah dilaksanakan. Yang kemudian Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

### **e. Bagi Pemerintah**

Manfaat penelitian bagi pemerintah dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan Nonformal yang merupakan salah satu pengembangan diri pendidikan luar sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas pendidikan Nonformal bagi anak jalanan yang berada di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS).

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini merupakan sebuah telaah teoritis berkenaan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu pendidikan non formal bagi anak jalanan di lingkungan pondok sosial ( LIPOSOS ) kabupaten Jember, dari beberapa sumber yang dapat menguraikan beberapa istilah dari judul penelitian tersebut.

### 2.1 Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *paedagogy*, yang mengandung makna seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar seorang pelayan. Sedangkan pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan *paedagogos*. Dalam bahasa Romawi pendidikan diistilahkan dengan *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada di dalam. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Muhadjir 2000:20-21)

Menurut Driyarkara (1945:145), inti pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda. Pada dasarnya pendidikan adalah pengembangan ketarah insani. Sedangkan Ki Hajar Dewantara (1977:20) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Artinya, pendidikan menurut segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi tingginya.

Brubacher (1987:371) berpendapat pendidikan merupakan proses pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik, didukung dengan alat (media) yang disusun sedemikian rupa, sehingga pendidikan dapat digunakan untuk menolong orang lain atau dirinya sendiri dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan

Crow (dikutip dari Zahara H, 1992), Pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan

sosialnya dan membantu kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan serta kelembagaan sosial dari generasi kegenerasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (1), Ayat (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, non formal maupun informal sampai dengan suatu taraf kedewasaan tertentu.

## **2.2 Anak Jalanan**

Anak jalanan merupakan salah satu Penyandang Masalah Pendidikan Anak Jalanan sehingga Dinas Sosial perlu melakukan bimbingan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja kewirausahaan bagi anak jalanan atau bisa disebut sebagai pelatihan kerja bagi anak jalanan agar anak jalanan tersebut tidak lagi dianggap mengganggu dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Anak jalanan adalah kelompok anak yang menghadapi banyak masalah selain masalah pribadi sehari-hari dijalanan, perkawanan dan pekerjaan, anak jalanan juga langsung menerima pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Menurut Mulandar (1996:153) anak jalanan juga banyak menghadapi resiko-resiko, antara lain:

- a. korban eksploitasi seks ataupun ekonomi
- b. penyiksaan fisik
- c. kecelakaan lalu lintas
- d. ditangkap polisi
- e. korban kejahatan dan penggunaan obat
- f. konflik dengan anak lain

g. terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum baik sengaja maupun tidak sengaja

Departemen Sosial RI (dalam <http://www.sulutnet.com/>) mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umumnya. Sedangkan anak jalanan menurut Sudajat (1999:5) (dalam <http://www.sekitarkita.com/>).

anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu : *pertama*, anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan / children the street). *Kedua*, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (children on the street). *Ketiga*, anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (vulnerable to be street children). Sementara itu anak jalanan menurut Yayasan kesejahteraan anak Indonesia (1999:22–24) (dalam <http://www.suaramerdeka.com/>) anak jalanan dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu : (1). Anak – anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya (children of the street). (2). Anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka adalah anak yang bekerja di jalan (children on the street). (3). Anak-anak yang berhubungan teratur dengan orang tuanya. Mereka tinggal dengan orang tuanya, beberapa jam di jalanan sebelum atau sesudah sekolah. (4). Anak-anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Mereka berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil suatu pekerjaan. Umumnya mereka telah lulus SD bahkan ada yang SLTP.

Penyebabnya, keadaan kota mengundang maraknya anak jalanan. Kota yang padat penduduknya dan banyak keluarga bermasalah membuat anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, berasyarakat, dan hidup merdeka, atau bahkan mengakibatkan anak-anak dianiaya batin, fisik, dan seksual oleh keluarga, teman, orang lain lebih dewasa.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah sekumpulan anak yang masih membutuhkan orang lain yang dapat memotivasi



mereka agar dapat mengembangkan diri melalui pendidikan nonformal seperti keterampilan dan pelatihan yang dimiliki sehingga menjadi bekal hidup dimanapun mereka berada.

### **2.3 Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan**

Pada hakekatnya keilmuan pendidikan nonformal, baik sebagai teori maupun sebagai pengembangan program, secara lebih jelas dapat dilihat dari berbagai definisi yang berhubungan dengan konsep keilmuan pendidikan nonformal, seperti diuraikan berikut ini.

Ilmu pendidikan nonformal mempunyai landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan nonformal merupakan dasar tempat berpijak, mengkaji dan menelaah kegiatan pendidikan nonformal.

Landasan filosofis pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh landasan ideology yang dianut oleh bangsa itu sendiri. landasan filosofis Bangsa Indonesia berbeda dengan landasan philosophers pendidikan bangsa lainnya. Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa, merupakan landasan pembangunan dan pengembangan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Melalui program pembelajaran dalam pendidikan nonformal diharapkan dapat membantu warga belajar memilih dan mengembangkan wawasan ke-Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. (Sudjana, 1989:197).

Phillip Coombs dan Manzoor (1974) dalam pemikiran dan konsepnya telah melahirkan strategi-strategi baru dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman bagi masyarakat miskin di pedesaan dalam meningkatkan kehidupan (khususnya dalam bidang ekonomi). Konsep dasar pemikiran Coombs telah tentang melahirkan konsep tentang pendidikan nonformal, informal dan formal, yang sampai saat ini menjadi acuan utama para ahli pendidikan khususnya ahli pendidikan nonformal. Salah satu buku yang terkenal berjudul memberantas kemiskinan melalui pendidikan nonformal. Juga beberapa tulisan lain yang berhubungan dengan peran pendidikan nonformal di masyarakat.

Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan, melalui hubungan sosial membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita – cita sosial ( yang efektif ) guna meningkatkan taraf hidup dibidang materil, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Hamojoyo (97:vii)

Menurut Freire (1921–1997) pendidikan nonformal adalah obat mujarab bagi seluruh penyakit pendidikan masyarakat.pemikiran dan konsep-konsepnya memberikan keleluasaan kepada pendidikan nonformal untuk tumbuh dan berkembang dalam melayani masyarakat, dan sebagai pendidikan alternatif di pendidikan formal. Secara luas Coombs (1973:11) memberikan rumusan tentang pendidikan nonformal adalah: setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, diselenggarakan di luar pendidikan persekolahan, dilaksanakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di dalam mencapai tujuan belajar. berkembang dalam melayani masyarakat, dan sebagai pendidikan alternatif di pendidikan formal.

Marzuki (2010:106) pendidikan nonformal adalah suatu kebutuhan karena di negara manapun di dunia ini pasti ada sekelompok orang yang memerlukan layanan pendidikan sebelum mereka masuk sekolah, sesudah mereka menyelesaikan sekolah, ketika mereka tidak mendapat kesempatan sekolah, bahkan ketika mereka sedang bersekolah.

Undang–Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal (1), Ayat (12) pendidikan nonformal jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 :

- a. pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- b. pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- c. pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- d. satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- e. kursus dan pelatihan diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- f. hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- g. ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

## **2.4 Sepuluh Patokan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)**

- a. Sumber Belajar

Sihombing (2002:11) Sumber Belajar, adalah orang yang memiliki kelebihan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap tertentu, memiliki kemampuan dan mau untuk mengalihkan apa yang dimilikinya kepada warga belajar melalui proses pembelajaran, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada warga belajar. Sedangkan menurut Rusman (2007:64) sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Zein (2009:47) juga mengemukakan Sumber Belajar, adalah warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang bersedia memberikan atau menularkan pengetahuan atau keterampilannya kepada orang lain melalui kegiatan/program PLS.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Belajar merupakan Orang yang memiliki kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan dan mau menularkannya kepada orang lain melalui program PLS .

#### b. Warga Belajar

Sihombing (2002:11) Warga Belajar, adalah warga masyarakat yang mengikuti program pendidikan luar sekolah (PLS) dalam sistem pendidikan nasional warga belajar disebut peserta didik warga belajar disebut subyek dalam belajar. Sedangkan menurut Zein (2009:47) Warga Belajar, adalah warga masyarakat yang mengikuti program PLS, disebut warga belajar (WB); Mereka adalah warga masyarakat yang sedang belajar. Warga masyarakat PLS meliputi anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa warga belajar merupakan Warga masyarakat yang mengikuti program PLS yang disebut peserta didik yang meliputi anak – anak,remaja,pemuda,orang dewasa baik laki – laki maupun perempuan.

#### c. Panti Belajar

Sihombing (2002:12) Panti Belajar, adalah tempat belajar yang layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Zein (2009:49) Panti Belajar, adalah tempat belajar yang layak digunakan untuk kegiatan

belajar. Jika pendidikan formal sudah menyediakan gedung sekolah, maka PLS masih amat langka yang disediakan gedung/bangunan khusus untuk kegiatan belajar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa panti belajar merupakan tempat belajar yang layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

#### d. Ragi Belajar

Sihombing (2002:12) Ragi Belajar, adalah sesuatu yang mampu membangkitkan semangat belajar warga belajar, sehingga proses pembelajaran terjadi: terjadi tanpa paksaan, gertakan tetapi karena kesadaran warga belajar serta kekuatan yang ada pada ragi belajar itu sendiri. Sedangkan menurut Zein (2009:49) Ragi Belajar, warga belajar akan bersemangat mengikuti program PLS jika mendapatkan dorongan yang menyenangkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Ragi belajar merupakan Sesuatu yang dapat membangkitkan semangat warga belajar sehingga pembelajaran terjadi tanpa paksaan ataupun gertakan.

#### e. Dana Belajar

Sihombing (2002:12) Dana Belajar, adalah uang atau materi lainnya yang dapat diuangkan dalam menunjang pelaksanaan program pembelajaran yang telah disusun oleh pamong belajar bersama sumber belajar dan warga belajar. Sedangkan menurut Zein (2009:50) Dana Belajar, adalah factor primer dalam penyelenggaraan program PLS. Tanpa dana yang cukup, mustahil program PLS dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dana belajar merupakan uang yang dapat menunjang pelaksanaan program pembelajaran PLS agar berjalan lancar dan berhasil.

#### f. Kelompok Belajar

Sihombing (2002:13) Kelompok Belajar, adalah sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang, yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama, dan bersepakat untuk saling membelajarkan. Sedangkan menurut Zein (2009:48) Kelompok Belajar, adalah

group atau perkumpulan dari sejumlah orang yang berstatus sebagai warga belajar, sumber belajar dan pamong belajar yang sedang mengadakan kegiatan pembelajaran.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Kelompok belajar adalah sejumlah warga belajar yang berkumpul dalam suatu kelompok yang memiliki yang memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama sehingga terjadi suatu proses belajar mengajar.

#### g. Program Belajar

Sihombing (2002:13) Program Belajar, adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Sedangkan menurut Zein (2009:50) Program Belajar, jika penyelenggaraan pendidikan formal dipersyaratkan adanya kurikulum, maka dalam penyelenggaraan program PLS dipersyaratkan adanya program belajar.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Program belajar merupakan beberapa kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi, cara dan waktu pembelajaran sehingga semuanya terbentuk menjadi program belajar.

#### h. Proses Belajar

Sihombing (2002:13) Proses Belajar, adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Sedangkan menurut Baharuddin (2007:16) Proses Belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar proses belajar terjadi secara abstrak, karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Proses belajar merupakan aktifitas yang terjadi pada pusat syaraf individu dan tidak dapat diamati.

#### i. Hasil Belajar

Sihombing (2002:14) Hasil belajar, adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah melalui proses pembelajaran tertentu dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). Sedangkan menurut Horwart dalam bukunya

Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 : 22). Zein (2009:51) juga mengemukakan Hasil Belajar, adalah program PLS selalu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada sertifikat kelulusan. Hasil belajar program PLS diprioritaskan pada keterampilan dan atau keahlian yang fungsional bagi kehidupan hidup sehari-hari.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil belajar merupakan keterampilan, pengetahuan dan keahlian yang fungsional yang dikuasai oleh warga belajar setelah mengikuti proses pembelajaran.

j. Evaluasi Belajar

Sihombing (2002:15) Evaluasi Belajar, adalah proses memberikan nilai terhadap hasil pendidikan dengan menggunakan alat yang dapat di pertanggung jawabkan (alat yang tepat). Sedangkan menurut Hamalik (2007:159) Evaluasi Hasil Belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang ingin dicapai oleh warga belajar setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Belajar merupakan keseluruhan nilai terhadap hasil pendidikan yang berupa kegiatan pengumpulan data pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk mengetahui hasil belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar guna mencapai tujuan pembelajaran.

## **2.5 Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat umum.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) usia 5 – 18 tahun
- b. melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalan atau ditempat umum minimal 4jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu, seperti pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dan lain-lain;
- c. kegiatannya dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum (Profil Dinas Sosial Kabupaten Jember. Penerbit Dinas Kabupaten Jember Tahun 2012).

Pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*) merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup.

Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (26), Ayat (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (1), Ayat (16) Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk rakyat.

Menurut Michael W. Galbraith, *community based education could be defined as an educational process by which individuals (in this case adults) become more competent in their skills, attitudes, and concepts in an effort to live in and gain more control over local aspects of their communities through democratic participation.* Artinya, pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa menjadi lebih berkompeten dalam ketrampilan, sikap, dan konsep mereka dalam upaya untuk hidup dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi



demokratis. Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis masyarakat dikemukakan oleh Mark K.Smith (1994:53).

*... as a process designed to enrich the lives of individuals and groups by engaging with people living within a geographical area, or sharing a common interest, to develop voluntarily a range of learning, action, and reflection opportunities, determined by their personal, social, economic and political need."*

Artinya adalah bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagi mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik mereka.

Kalimat yang tertuang pada pasal 55 Bab XV Undang – Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat, penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan, dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku, lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada Pasal 26 Ayat 1 s/d 7 jalur yang digunakan bisa formal dan atau nonformal. Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga

masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan concern terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik,, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain. Sementara pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok. Untuk memenuhinya, maka partisipasi warga harus didasari kebebasan tanpa tekanan dalam kemampuan berpartisipasi dan keinginan berpartisipasi.

Menurut Galbraith (1999:39) pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip sebagai berikut:

- a. *self determination* (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.

- b. *self help* (menolong diri sendiri) Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri.
- c. *leadership development* (pengembangan kepemimpinan) Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.
- d. *localization* (lokalisasi). Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- e. *integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan) Adanya hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- f. *reduce duplication of service*. Pelayanan Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- g. *accept diversity* (menerima perbedaan) Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.

- h. *institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan) Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan.
- i. *lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup) Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat.

Batten menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat ialah proses yang dilakukan oleh masyarakat dengan usaha untuk pertama-tama mendiskusikan dan menentukan kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan secara bersama usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu (Batten, 1961). Dalam proses tersebut maka keterlibatan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut. Tahap pertama, dengan atau tanpa bimbingan pihak lain, masyarakat melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, keinginan dan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian mereka mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka, menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan itu berdasarkan tingkat keperluan, kepentingan dan mendesak tidaknya usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan itu didiskusikan pula kebutuhan perorangan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Pemerintah di daerah itu. Mereka menyusun urutan prioritas kebutuhan itu sesuai dengan sumber dan potensi yang terdapat di daerah mereka. Tahap kedua, mereka menjajagi kemungkinan-kemungkinan usaha atau kegiatan yang dapat mereka lakukan, untuk memenuhi kebutuhan itu. apakah sesuai dengan sumber-sumber yang ada dan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam kegiatan itu. Selanjutnya mereka menentukan pilihan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan bersama. Tahap ketiga, mereka menentukan rencana kegiatan, yaitu program yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dikalangan

masyarakat. Rasa kepemilikan bersama itu menjadi prasarat timbulnya rasa tanggung jawab bersama untuk keberhasilan usaha itu. Tahap keempat ialah melaksanakan kegiatan. Dalam tahap keempat ini motivasi perlu dilakukan. Di samping itu komunikasi antara pelaksana terus dibina. Dalam tahap pelaksanaan ini akan terdapat masalah yang menuntut pemecahan. Pemecahan masalah itu dilakukan setelah dirundingkan bersama oleh masyarakat dan para pelaksana. Tahap kelima, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan, terhadap hasil kegiatan dan terhadap pengaruh kegiatan itu. Untuk kegiatan yang berkelanjutan, hasil evaluasi itu dijadikan salah satu masukan untuk tindak lanjut kegiatan atau untuk bahan penyusunan program kegiatan baru. Semua tahapan kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif. Pengembangan masyarakat yang bertumpu pada kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional itu memiliki dua jenis tujuan. Tujuan-tujuan itu dapat digolongkan kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dengan sendirinya mengarah dan bermuara pada tujuan nasional, sedangkan tujuan khusus yaitu perubahan-perubahan yang dapat diukur yang terjadi pada masyarakat. Perubahan itu menyangkut segi kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri setelah melalui program pengembangan masyarakat. Perubahan itu berhubungan dengan peningkatan taraf hidup warga masyarakat dan keterlibatannya dalam pembangunan. Dengan kata lain tujuan khusus itu menegaskan adanya perubahan yang dicapai setelah dilakukan kegiatan bersama, yaitu berupa perubahan tingkah laku warga masyarakat. Perubahan tingkah laku ini pada dasarnya merupakan hasil edukasi dalam makna yang wajar dan luas, yaitu adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aspirasi warga masyarakat serta adanya penerapan tingkah laku itu untuk peningkatan kehidupan mereka dan untuk peningkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan masyarakat itu bisa terdiri dari partisipasi buah pikiran, harta benda, dan tenaga (Anwas Iskandar, 1975). Dalam makna yang lebih luas maka tujuan pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pengembangan demokrasi, dinamisasi dan modernisasi (Suryadi, 1971). Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dikemukakan di sini ialah keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri (swadaya dan gotong royong), dan

kaderisasi. Prinsip keterpaduan memberi tekanan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat didasarkan pada program-program yang disusun oleh masyarakat dengan bimbingan dari lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan tugas dalam pembangunan masyarakat. Prinsip berkelanjutan memberi arti bahwa kegiatan pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekali tuntas tetapi kegiatannya terus menerus menuju ke arah yang lebih sempurna. Prinsip keserasian diterapkan pada program-program pembangunan masyarakat yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah. Prinsip kemampuan sendiri berarti dalam melaksanakan kegiatan dasar yang menjadi acuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip di atas memperjelas makna bahwa program-program pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan nonformal. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasi untuk membangun serta telah tumbuh kesadaran dan semangat mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan tertentu yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat desanya sendiri sebagai suatu kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya.

Dari apa yang telah diuraikan terdahulu dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan pendidikan nonformal berbasis masyarakat sebagai berikut:

- a. pendidikan berbasis masyarakat merupakan upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya membangun pendidikan untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan perannya dalam kehidupan.

- b. pendidikan nonformal berbasis masyarakat merupakan suatu upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal lebih berperan dalam upaya membangun masyarakat dalam berbagai bidangnya, pelibatan masyarakat dalam pendidikan nonformal dapat makin meningkatkan peran pendidikan yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.
- c. untuk mencapai hal tersebut pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pendidikan nonformal menjadi suatu keharusan, dalam hubungan ini diperlukan tentang pemahaman kondisi masyarakat khususnya di desa berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya, serta turut bertanggungjawab dalam upaya terus mengembangkan pendidikan yang berbasis masyarakat, khususnya masyarakat desa.

## **2.6 Kaitan Penelitian Terdahulu**

Setelah diuraikan teori-teori yang dianggap relevan untuk membantu memperjelas arah pembahasan permasalahan dalam penelitian ini nantinya, maka sebelum penulis beranjak pada penelitian lebih lanjut tentang pelatihan kerja bagi anak jalanan akan dikemukakan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya yang juga membahas hal yang hampir serupa.

Seperti hasil penelitian Putri Wahyu. W Tahun 2006 (020910301168) tentang Upaya Pembinaan Remaja Putus Sekolah pada Panti Sosial Bina Remaja Putus Sekolah pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Mardi Karya Utama” Jombang berupa bimbingan mental, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan bimbingan pengembangan sosial.

Dalam pelaksanaan bimbingan mental dapat digambarkan tepat sasaran karena materi yang disampaikan sesuai dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat langsung dipraktikkan. Namun dalam pelaksanaannya masih terlalu monoton sehingga klien merasa bosan dan kurang paham. Pelaksanaan bimbingan fisik dapat dilaksanakan dengan baik namun kurang optimal. Bimbingan sosial

dapat dilihat dari kegiatan aktif karang taruna yang ada di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Mardi Karya Utama” Jombang. Sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan pengembangan sosial mengenai keterampilan kerja tidak semua klien mengikutinya.

Selain hasil penelitian diatas, ada juga peneliti Rosmawati Biana Tahun 2006 (010910301124) tentang Pembinaan Pengamen Anak Jalanan (Studi Deskripsi pada Sanggar Alang-Alang Surabaya) yang menyatakan bahwa alasan ekonomi adalah salah satu yang melatar belakangi anak-anak turun kejalanan karena mereka harus bekerja pada sektor informal ini. Anak jalanan juga tidak memperdulikan bahaya pada dirinya sendiri baik dari keluarga maupun dari luar. Alasan kedua adalah ketidak harmonisan keluarga dan anak merasa terabaikan. Alasan ketiga adalah faktor lingkungan yang mendorong anak berada dijalanan. Mereka berasal dari keluarga harmonis tapi karena pengaruh dari lingkungan (teman sepermainan, tetangga) yang akhirnya membawa anak berada di jalanan.

Imej anak jalanan terkesan liar, kotor dan identik dengan kekerasan. Melihat hal itu Sanggar Alang-Alang, Surabaya membawa mereka ke kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan anak-anak. Dalam proses pembinaan terdapat pendampingan yang bertindak sebagai teman, orang tua. Sanggar Alang – Alang Surabaya ini menggunakan pendekatan *centre based* yaitu penanganan di lembaga/panti. Anak yang masuk program ini ditampung dan diberikan pelayanan dari lembaga/panti tapi model penampungan disini bersifat sementara/*drop-in centre* sebab anak jalanan yang masuk di Sanggar Alang-Alang ini masih memiliki keluarga dan masih bolak-balik antara sanggar dan jalanan.

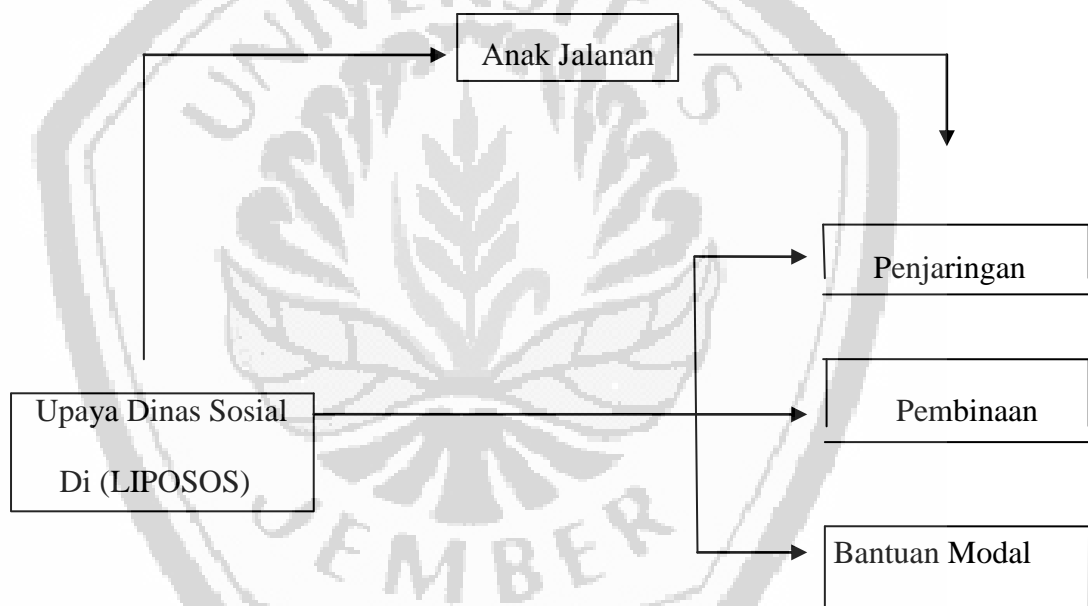
Bentuk pembinaan di Sanggar Alang-Alang ini berupa pembinaan bermusik, pembinaan etika dan kepribadian, pembinaan keterampilan, pembinaan rohani, rekreasi, menabung dan belajar bersama. Hasil dari pembinaan dapat dilihat dari perilaku mereka sehari-hari. Anak-anak yang dulunya berperilaku nakal dan liar menjadi anak yang berperilaku sopan, bersih dan ramah. Selain itu adanya beberapa kelompok musik yang berasal dari Sanggar Alang-Alang yang melejit yang membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak sia-sia.



## 2.7 Kerangka Berfikir Peneliti Bagi Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan salah satu penyandang masalah Kesejahteraan Sosial sehingga Dinas Sosial perlu melakukan suatu upaya bimbingan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja kewirausahaan bagi anak jalanan tersebut tidak lagi dianggap mengganggu dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Agar lebih mudah dipahami, kerangka pemikiran penelitian ini akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7. : Kerangka pemikiran peneliti

Dari skema diatas, dapat kita bagi menjadi tiga konsep yaitu: pengertian anak jalanan, pendidikan, pendidikan nonformal dan Model penanganannya.

### a. Pengertian Anak Jalanan

Menurut Kartono (1992:02) menyatakan bahwa "anak jalanan dalam kenyataannya di karakteristik sebagai salah satu penyakit sosial atau masalah

sosial. Yaitu situasi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat dan dianggap mengganggu, berbahaya dan merugikan orang banyak. Sedangkan menurut Suyanto dan Sri (2002:41) menyatakan bahwa:

Marginal, rentan dan eksploratif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung karena jam kerja yang begitu panjang dan berada di jalanan yang benar-bener dalam segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploratif karena mereka biasanya dalam posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah dan cenderung menjadi obyek perlakuan yang sewenang dari preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab.

Posisi anak menurut Suyanto dan Sri (2002:xi) sangatlah rawan dikarenakan pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, bahkan seringkali dilanggar hak-haknya.

Anak jalanan menurut fanggidae (1993:117) adalah “komunitas kota, kehadiran mereka sangat erat hubungannya dengan latar belakang berikut ini: lemahnya kondisi ekonomi keluarga, kondisi lingkungan komunitas anak atau gabungan faktor-faktor tersebut.

Anak jalanan dalam konteks kesejahteraan anak di indonesia mengacu pada UU Nomor. 4 Tahun 1979, dimana anak jalanan dianggap sebagai bagian dari anak indonesia pada umumnya juga memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sampai dewasa.

Anak jalanan tidak langsung menjadi anak jalanan, mereka mengalami kejadian dan harus melaluinya dengan tegar bahkan sendirian. Adapun proses terjadinya anak jalanan menurut dinas sosial yaitu:

tahap I. Pengetahuan sampai adanya ketertarikan

Adanya kebiasaan bermain kelompok dari anak-anak kampung dan diperjalanan mereka menjumpai anak-anak jalanan sedang bekerja. Sampai disini sebatas melihat bahwa ada pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dan itu dapat dilakukan anak seusia dirinya. Namun adalah tahap ini tidak membuat anak langsung terjun ke jalanan, melainkan bergantung pada stimulus berikutnya.

tahap II. Ketertarikan sampai keinginan

tahap ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapat faktor pendorong, seperti kondisi ekonomi atau faktor keretakan keluarga. Faktor-faktor tersebut akan memperkuat keinginan anak untuk turun ke jalan.

tahap III. Pelaksanaan

Anak - anak mulai melaksanakan niatan dengan mendatangi tempat operasi. Bila mereka menemukan teman yang sudah dikenal maka keinginan segera terealisasi.

tahap IV. Mulai memasuki kehidupan anak jalanan

Dalam tahap ini, si anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan dijalan. Namun demikian hal ini bergantung pada anak itu sendiri dan teman yang membawanya. Yang tak kalah penting peranan orang tua untuk tetap mengontrolnya.

Bila pihak ketiga diatas memiliki peran dan pengaruh positif, maka meskipun berada dijalan, anak akan tetap positif dan tak tercabut dari norma dan nilai yang telah dipegang sebelumnya. Tetapi jika tidak, norma negatif yang akan mempengaruhinya.

tahap V. Terjerumus atau kembali pada kehidupan yang wajar

Ada dua kemungkinan bila anak dalam perkembangannya semakin sulit dalam mencari nafkah di jalan yaitu:

Kemungkinan pertama, bertahan dengan memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas.

Kemungkinan kedua, bila menerima stimulus baik dari kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, maka si anak sudah termasuk anak jalanan bebas dimana norma agama dan kemasyarakatannya cenderung ditinggalkan. Pada tahap inilah kecenderungan perilaku menyimpang.

Secara garis besar, anak jalanan menurut Dinas Sosial Kabupaten Jember dapat dibedakan menjadi:

(1). Anak – anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya (*children of the street*). (2). Anak–anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka adalah anak yang bekerja di jalan (*children on the street*). (3). Anak – anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Hubungan keluarga cukup erat tapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lainnya atau hidup menggelandang.

Sudrajat (dalam Mulandar 1996:154) menjelaskan tiga tingkatan yang menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan yaitu:

- a. tingkat Mikro (*Immediate Causes*)  
yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi anak jalanan dan keluarganya.
- b. tingkat Meso (*Underlying Causes*)  
yaitu faktor-faktor yang ada di masyarakat tempat anak dan keluarga berada.
- c. tingkat Makro (*Basic Causes*)  
yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan struktur makro dari masyarakat seperti ekonomi, politik dan kebudayaan.

Anak jalanan yang mengikuti pembinaan ini kebanyakan memiliki permasalahan di tingkat Makro (*Basic Causes*) karena anak terpaksa berada di

jalanan karena faktor ekonomi keluarga yang cenderung miskin. Hal itu menyebabkan anak jalanan terpaksa membantu beban orang tua mereka dengan cara bekerja mesti tidak memiliki keterampilan khusus. Padahal setiap anak memiliki hak untuk terpenuhinya kebutuhannya.

Kebutuhan menurut Maslow dalam Sumarnougroho (1991:06)

- a. Kebutuhan fisik (udara, air, makan dan sebagainya)
- b. Kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kehidupan serta terpuaskan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan)
- c. Kebutuhan untuk saling menyayangi dan disayangi
- d. Kebutuhan untuk penghargaan
- e. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan bertumbuh

#### a. Peranan Dinas Sosial

Menurut kamus bahasa Indonesia (1994:1250) upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). Berbicara tentang upaya Dinas Sosial berarti sama dengan membicarakan tentang peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan. Hal ini sesuai visi dan misi dari Dinas Sosial itu sendiri yang ingin memberdayakan masyarakat penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan anak jalanan adalah salah satunya. Peranan (*role*) menurut Soekanto (2003:243) adalah “Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain dan orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial. Peran Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan bagi anak jalanan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif pada anak jalanan agar anak jalanan tersebut tidak lagi berada di jalanan dan mengganggu orang lain serta dapat menghilangkan pandangan negatif orang lain terhadap mereka.

Dalam hal ini peran Dinas Sosial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menangani anak jalanan ini. Menurut Prinst (1997:34) dalam Biana (2006), dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial berperan sebagai:

1). motivator

Yaitu memberikan informasi, sugesti dan dorongan pada seseorang keluarga maupun masyarakat sehingga berkemauan, bersemangat dan bertekad mencegah dan menyelesaikan masalah Kesejahteraan Sosial

2). dinamisator

Yaitu mengarahkan dan menggerakkan seseorang, keluarga ataupun masyarakat sehingga berkemampuan mengenal dan mendayagunakan secara swadaya semua sumber dan potensi Kesejahteraan Sosial untuk sebesar-besarnya mencapai Kesejahteraan Sosial.

3). pelaksana

Yaitu pelaksana tugas-tugas pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dinas Sosial sebagai motivator selalu memberikan motivator selalu memberikan motivasi dan dorongan pada anak jalanan agar anak jalanan tidak mudah menyerah dan tetap semangat dalam menerima pelatihan sehingga dapat merubah nasibnya sendiri dan keluarganya serta tidak lagi berada di jalanan. Dinas Sosial sebagai Dinamisator adalah memberikan kebebasan pada anak jalanan untuk memilih sendiri jurusan sesuai dengan minat masing-masing. Kemudian dalam praktek kerja, dibentuklah KUBE agar anak jalanan dapat bekerja sama dan

menjalin kekompakan dengan orang lain. Tujuan dibentuk KUBE adalah agar anak jalanan dapat mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing anak dan menjalankannya bersama sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Selain itu, Dinas Sosial sebagai pelaksana dari pemerintah juga mengurus penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yaitu: fakir miskin, gelandangan, tuna susila, anak jalanan dan beberapa masalah Kesejahteraan Sosial lainnya.

Upaya dalam menangani anak jalanan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan menurut Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar anak jalanan
  - 1). Dipenuhinya kebutuhan gizi, kesehatan anak jalanan
  - 2). Anak jalanan tidak putus sekolah dan dapat menyelesaikan pendidikannya.
- b. Mengurangi kebiasaan buruk yang dilakukan anak jalanan melalui pembinaan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember
- c. Menyatukan anak dengan orang tuanya jika memungkinkan atau memasukkan anak kedalam keluarga pengganti, panti dan sebagainya
- d. Terwujudkannya ketrampilan anak jalanan melalui bimbingan ketrampilan dan pemberian bantuan
- e. Terwujudnya kemampuan orang tua anak jalanan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya

Selain itu dasar hukum yang digunakan dalam penanganan anak jalanan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34  
“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”
- b. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- c. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.  
“Usaha-usaha pemerintah dibidang Kesejahteraan Sosial meliputi bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi termasuk didalamnya penyaluran dan dalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok

yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup yang terlantar atau tersesat, pengembangan dan penyaluran sosial untuk meningkatkan peradapan, pri kemanusiaan, dan kegotongroyongan.”

- d. MOU Gubernur Jawa Timur dengan Bupati/Walikota No. 120.1/209/2004 tentang kerjasama penanganan PMKS khususnya Anak Jalanan, WTS, Gelandangan dan Pengemis, gelandangan psykotik.
- e. Peraturan Bupati Jember No. 28 Tahun 2006 tentang KOMITE PMKS Kabupaten Jember.
- f. Model Penanganan Terhadap Anak Jalanan  
Menurut kamus bahasa Indonesia, (1994:1137). Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Sedangkan menangani adalah mengerjakan (menggarap sendiri). Dalam menangani anak jalanan dapat dikatakan sebagai usaha, tindakan dengan kemampuan tertentu untuk menjalankan tugas yang bermamfaat dengan hal yang baik dan bertujuan untuk membawa anak-anak jalanan yang memiliki kondisi kurang baik pada perubahan yang lebih baik serta dapat menciptakan kemandirian. Selain itu, dapat diartikan pula meningkatkan pendidikan mereka dengan jalan menggali potensi dan menyalurkan akses yang dimiliki pada masing-masing individu.

Menurut Sudrajat dalam Mulandar (1996:156-157) menyatakan bahwa ada tiga tipe pendekatan program yang biasanya dilakukan oleh lembaga atau badan sosial dalam menangani anak jalanan, yaitu:

*a. Street Based*

Merupakan penanganan di jalan atau tempat-tempat anak jalanan berada, kemudian para *street edukator* datang dan berdialog pada mereka, mendampingi, memahami dan menerima situasi serta menempatkan diri sebagai teman. Anak-anak jalanan juga diberi materi pendidikan dan keterampilan.

*b. Centre Based*

Merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak-anak dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan dilembaga atau panti. Dalam penanganan



atau panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan yaitu penampungan yang bersifat sementara atau anak jalanan yang masih bolak-balik (*drop-in centre*) dan tetap (*residential centre*).

c. *Comunity Based*

Dalam hal ini, penanganan melibatkan seluruh potensi masyarakat, utamanya keluarga atau anak jalanan. Pendekatan ini bersifat *preventif*, yaitu mencegah anak-anak turun ke jalan keluarga diberikan penyuluhan pengasuhan anak dan peningkatan taraf hidup, sementara anak diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal sebagai pengisi waktu luang dan kegiatan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak – anaknya.

Tiga pendekatan diatas merupakan pilihan yang bisa diterapkan kepada kondisi anak - anak. Tidak satupun tipe pendekatan yang dilakukan lebih baik dari yang lain, karena setiap tipe memiliki ciri khas tersendiri dan semuanya tergantung pada kebutuhan dan masalah anak jalannya. Berdasarkan pengertian ini pula maka keberhasilan penanganan tergantung pada pengaruhnya kepada anak.

Tipe pada pelatihan kerja untuk anak jalanan di Dinas Sosial itu adalah tipe pendekatan *Centre Based*. Pendekatan ini merupakan penanganan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti, seperti memberikan makan siang atau snack. Pada panti yang permanen di sediakan pelayanan pendidikan, ketrampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan. Dalam hal ini Dinas sosial menyediakan pembinaan bagi anak jalanan yang berupa pembukaan, pelatihan kerja, dan penutupan/terminas sehingga diharapkan dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik, dan terampil atau *skilled labour*

Dalam penanganan di lembaga atau panti ini terdapat beberapa jenis atau model penampungan, yaitu penampungan yang bersifat sementara (*drop-in centre*) dan tetap (*residential centre*). Anak jalanan yang mengikuti pembinaan

yang dilakukan Dinas Sosial termasuk dalam drop-in centre karena bolak – balik dari rumah ke lingkungan pondok sosial (LIPOSOS).

Fungsi penanganan bagi anak jalanan adalah menurut Dinas Sosial adalah:

a. fungsi pencegahan bagi anak jalanan, maka haruslah memperhatikan pandangan bahwa setiap langkah penanganan harus mencegah agar masalah anak jalanan tidak meluas dan masalah anak jalanan yang pernah ada tidak tumbuh kembali.

b. fungsi Kuratif Rehabilitatif

Anak jalanan sebagai penyandang Kesejahteraan Sosial yang ditandai oleh ketidak mampuannya untuk menjalankan berbagai fungsi anak dan peranan sosial anak secara wajar. Penanganan yang dilakukan seyogyanya diarahkan pada pemulihan fungsi tersebut.

c. fungsi Pemberdayaan

Setiap penyandang masalah (anak jalanan) dan keluarga memiliki kekuatan dibalik kelemahan. Kekuatan tersebut harus didukung dan didorong untuk menjadi modal bagi penyelesaian masalah.

d. fungsi penyelesaian

Terlindunginya anak jalanan dari tindak kekerasan atau perlakuan salah, perlakuan diskriminatif yang menghambat atau membahayakan kelangsungan hidup anak.

Dalam praktek pekerjaan sosial terdapat tiga jenis metode pokok, yaitu: metode bimbingan sosial perorangan (*Social Case Work*), metode bimbingan sosial kelompok (*Social Group Work*), dan metode bimbingan organisasi (*Social Community Organizacion/Social Community development*). Menurut Trecker mendefinisikan bimbingan sosial kelompok (*Social Group Work*) sebagai suatu metode bimbingan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu yang terikat dalam kelompok agar dapat mengikuti kegiatan kelompok. Dengan demikian, individu dapat bergaul dengan sesama anggota kelompok secara baik

dan dapat mengambil mamfaat dari pengalaman pergaulan atau perkembangan pribadi, kelompok, dan masyarakat (Hermawati, 1996:33-47).

Latar belakang seseorang memasuki dan menggunakan kelompok pada umumnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh teman dan persahabatan
- b. Untuk mewujudkan keinginan-keinginan dan memperoleh keterampilan
- c. Untuk memperoleh penerimaan (merasa diterima) dan memperoleh status dengan teman-teman sebaya.
- d. Untuk menjadi bagian dari suatu bahan/lembaga yang lebih besar dan lebih berpengaruh
- e. Untuk tumbuh dan memperoleh kebebasan dari pengendalian orang tua dan orang lain
- f. Untuk menyesuaikan diri dan mempelajari cara-cara mengadakan hubungan dengan jenis kelamin yang berbeda
- g. Untuk menjadi bagian dari masyarakatnya melalui cara-cara yang partisipatif
- h. Untuk memperoleh kesenangan, kesantiaian dan waktu-waktu senggang (sosial) yang sesuai dengan minatnya.

Pembinaan anak jalanan dilakukan secara berkelompok dengan dibentuknya KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang beranggotakan 3-5 orang yang akan menjadi kelompok dalam usaha pelatihan. Disini anak jalanan dapat bekerjasama dan saling percaya dengan kelompoknya. Diharapkan pula bahwa anak jalanan melalui KUBE ini dapat mandiridan bertanggung jawab dengan keputusan bersama dan hasil yang hendak dicapai.

Seperti yang dinyatakan oleh Wulandari, (2006:11) tentang karakteristik kelompok yang sesuai adalah:

- a. kelompok sebaiknya berjumlah cukup kecil agar dapat saling mengenal satu sama lain secara akrab dan ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan kelompok.

- b. kelompok harus kohesif, artinya ikatan yang mempercepat anggota kelompok secara bersama-sama dalam jangka waktu tertentu. Ikatan ini dapat berupa minat, keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda.
- c. kelompok harus memiliki organisasi pada taraf minimal, baik formal maupun informal sehingga anggota kelompok memiliki cara tertentu dalam menyepakati tujuan kelompok.
- d. kelompok harus memiliki cara-cara tertentu dan disetujui dalam hal memilih dan menerima setiap anggota kelompoknya
- e. kelompok dapat menerima dan berkeinginan untuk menerima badan sosial dan pekerja sosial serta menciptakan hubungan kerjasama dengannya

Karakteristik kelompok dalam pelatihan kerja yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jember diterapkan dalam pembentukan KUBE. Dalam KUBE hanya terdapat 3-5 anggota yang diharapkan dalam pelaksanaan dapat maksimal dan semua anggota dapat berperan aktif didalamnya. Masing-masing anggota juga harus memiliki kekompakan yaitu memiliki visi dan misi yang sama serta tujuan yang sama agar pikiran mereka dapat sejalan sehingga akan menghasilkan usaha yang mandiri. Selain itu, masing-masing anggota harus memiliki bagian-bagian sendiri agar pekerjaan dapat berjalan baik dan lancar.

Setelah dilakukannya upaya dalam menangani anak jalanan maka dapat kita lihat bahwa ketika sebuah lembaga melakukan program tersebut apakah berhasil atau tidak. Begitu juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Jember yang selalu berusaha agar tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan kerja bagi anak jalanan dapat terus meningkat.

Prinsip-prinsip indikator keberhasilan penanganan anak jalanan menurut Suharto (2007:235-236). (1). sebaiknya sedikit namun sensitif. Artinya indikator tersebut tidak terlalu banyak dan kompleks sehingga pengukuran dari waktu ke waktu dapat akurat dan tepat (*valid and reliable*), (2). variabel yang dikembangkan hendaknya berupa masukan (misal: fasilitas panti, pendidikan pekerja sosial), proses pelayanan atau kegiatan (misal : bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial), dan hasil yang

ingin dicapai dari proses tersebut, (3). data atau informasi yang diukur mudah diperoleh tapi sulit direkayasa atau dimanipulasi oleh informal, (4). sesuai dengan model penanganan (misal: pencegahan, dan pengembangan), (5). pada tingkat Provinsi, indikator keberhasilan penanganan anak jalanan dapat dirumuskan berdasarkan konteks wilayah Kabupaten atau Kota, namun tetap mengacu pada visi atau tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi secara terintegrasi.

## **2.8 Strategi Pembelajaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS)**

Metode secara harfiah berarti “cara”. Secara umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pendapat lain juga dijelaskan bahwa metode adalah cara atau prosedur yang dipergunakan oleh fasilitator dalam interaksi belajar dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata “mengajar” sendiri berarti memberi pelajaran (Fathurrohman dan Sutikno, 2007; 55).

Menurut Sugandi (2004:9) menyatakan bahwa pembelajaran terjemahan dari kata “instruction” yang berarti self instruction (dari internal) dan eksternal instructions (dari eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut teaching atau pengajaran. Sedangkan menurut Gagne dan Briggs (1979:3); Instruction atau pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Selanjutnya Eggen & Kauchak (1998), menjelaskan bahwa ada enam ciri pembelajaran yang efektif, yaitu: (1) siswa menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan, (2) guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran, (3) aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, (4) guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan

dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisis informasi, (5) orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir, serta (6) guru menggunakan teknik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru.

Pembelajaran partisipatif muncul sebagai akibat dari penggunaan strategi pembelajaran partisipatif dan dapat diartikan sebagai upaya pendidik untuk mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Keikutsertaan peserta didik di dalam program pembelajaran partisipatif. Keikutsertaan peserta didik itu diwujudkan dalam tiga tahapan kegiatan pembelajaran yaitu perencanaan program (program planning), pelaksanaan (program implementation), dan penilaian (program evaluation) kegiatan pembelajaran. (Sudjana,2010:130).

Menurut Hamzah B. Uno (2008:45) Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Dick dan Carey (2005:7) Strategi pembelajaran adalah komponen-komponen dari suatu set materi termasuk aktivitas sebelum pembelajaran, dan partisipasi peserta didik yang merupakan prosedur pembelajaran yang digunakan kegiatan selanjutnya. Selanjutnya menurut Suparman (1997:157) Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Teknik pembelajaran pendidikan luar sekolah, menjelaskan bahwa ada tiga pengertian tehnik pembelajaran pendidikan luar sekolah (PLS), yaitu: (1). Teknik pembelajaran merupakan melaksanakan apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan guru) untuk mencapai tujuan yang bersifat implementatif, (2). Teknik pembelajaran adalah keterampilan pembelajaran Keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang paling spesifik. Keterampilan meliputi keterampilan/teknik menjelaskan, demonstrasi, bertanya, dan masih banyak lagi, (3). Teknik pembelajaran pendidikan luar sekolah adalah keterampilan dan seni (kiat) untuk melaksanakan langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan suatu kegiatan dalam pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah sebenarnya sudah ada sebelum pendidikan formal lahir. Pendidikan luar sekolah (PLS) sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan manusia (Fure, 1981: 2). Pendidikan luar sekolah berjalan sesuai dengan peradaban manusia yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan, masyarakat melakukannya melalui upacara – upacara tradisional, keagamaan, kebudayaan, dan kegiatan belajar membelajarkan dalam bentuk magang oleh orang tua kepada anaknya atau orang yang sudah tahu kepada orang yang ingin tahu secara tradisional. Sedangkan menurut Adikusumo (1986: 57) dalam bukunya *Pendidikan Kemasyarakatan* mengemukakan pendidikan luar sekolah (PLS) adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah, dimana seseorang memperoleh informasi – informasi pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap – sikap peserta yang efisien yang efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya.

Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan luar sekolah mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana (1989: 107) mengemukakan peran pendidikan luar sekolah adalah sebagai “ pelengkap, penambah, dan pengganti”. *Sebagai pelengkap pendidikan sekolah*, pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi program didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerjasama dengan masyarakat. Programnya bermacam – macam, seperti pendidikan keterampilan produktif, olahraga, kesenian, kelompok belajar, kelompok rekreasi, dan kelompok pecinta alam. Pendidikan luar sekolah sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program –program (PLS) pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain – lain.

*Sebagai penambah pendidikan sekolah* pendidikan luar sekolah sebagai penambah pendidikan luar sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada: (a). Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah. Kegiatan belajar tambahan ini dilakukan diluar jam pelajaran dengan menggunakan ruang kelas disekolah yang bersangkutan atau ditempat lain. Materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Para pendidik pada umumnya adalah guru – guru mata pelajara yang bersangkutan atau sumber belajar lain yang ada dimasyarakat, (b). Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh. Kebutuhan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu: (a). Memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh untuk melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Kebutuhan ini biasanya dilakukan melalui bimbingan studi, bimbingan tes, kursus – kursus, dan kelompok belajar, (b). Menambah pengetahuan tentang materi belajar yang dirasakan penting sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat. Kebutuhan ini dilakukan melalui kursus – kursus, diskusi, seminar lokakarya, penelitian dan studi kepustakaan, (c). Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat. Upaya ini dikaitkan dengan keterampilan kerja dan berusaha.

Pendidikan luar sekolah sebagai penambah ini diarahkan untuk membekali para lulusan dan mereka yang putus sekolah untuk memasuki dunia kerja. *Sebagai pengganti pendidikan sekolah* pendidikan luar sekolah sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak – anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah, umumnya sekolah dasar. Program pendidikan ini sering diselenggarakan di daerah – daerah terpencil atau daerah yang disebut kantong terasing yang belum memiliki sekolah dasar. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari – hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan



pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis – jenis keterampilan lainnya. Kegiatan ini dikelola oleh lembaga – lembaga pemerintah dan badan – badan sosial yang mempunyai tugas pelayanan pada masyarakat.

Teknik pembelajaran luar sekolah (PLS), menjelaskan bahwa ada 3 pengertian teknik pembelajaran pendidikan luar sekolah (PLS), yaitu: (a). Teknik pembelajaran merupakan pelaksanaan apa yang sesungguhnya terjadi (dilakukan guru) untuk mencapai tujuan yang bersifat implementatif, (b). Teknik pembelajaran adalah keterampilan pembelajaran keterampilan merupakan perilaku pembelajaran yang paling spesifik. Keterampilan meliputi keterampilan atau teknik menjelaskan, demonstrasi, bertanya, dan masih banyak lagi, (c). Teknik pembelajaran pendidikan luar sekolah adalah pembelajaran dan seni (kiat) untuk melaksanakan langkah – langkah yang sistematis, dalam melakukan suatu kegiatan dalam pendidikan luar sekolah.

Berdasarkan pandangan diatas dapat dipahami bahwa metode belajar pendidikan luar sekolah merupakan cara – cara menyajikan pelajaran oleh peserta didik dari pendidik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode itu sendiri merupakan salah satu sub sistem dalam sistem pembelajaran, yang tidak akan bisa dilepaskan begitu saja.

## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian disebut juga daerah penelitian. Daerah penelitian merupakan daerah yang akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penentuan tempat penelitian ini adalah metode purposive, menurut Arikunto (2002:117) penentuan daerah penelitian *purposive* yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan pada strata, random, atau acak, tetapi berdasarkan dengan adanya tujuan tertentu.

- a. Peneliti sudah mengenal situasi dan kondisi daerah penelitian, sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian.
- b. Adanya kesediaan lembaga yaitu dari Tempat Penampungan Anak Jalanan (LIPOSOS), kabupaten Jember.
- c. Di tempat Penampungan Anak Jalanan (LIPOSOS), kabupaten Jember belum pernah diadakan penelitian dengan judul sejenis.

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 6 bulan, dengan perincian 2 bulan persiapan penelitian, 1 bulan pelaksanaan, dan 3 bulan pembuatan laporan. Adapun pelaksanaannya direncanakan akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni sampai dengan 10 November Tahun 2012.

### **3.2 Penentuan Informan Penelitian**

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif dinamakan informan kunci, narasumber, partisipan, teman atau gurudalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung yaitu memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari informan kunci sebelumnya, peneliti dapat menetapkan informan yang lainnya yang diharapkan

dapat memberikan data yang lebih lengkap yaitu informan pendukung (Sugiyono, 2005:54-55).

Penentuan informan adalah cara untuk menentukan siapa individu yang dapat memberikan data yang dibutuhkan. Ada dua cara dalam menentukan informan, yaitu penentuan informan kunci untuk mendapatkan data penunjang. Metode penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan purposive berdasarkan kriteria

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, maka diperoleh informan kunci dalam penelitian ini adalah penyelenggara atau pengelola Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

- a. Tercatat sebagai pengelola Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember
- b. Memiliki kewenangan menentukan kebijakan tentang perkembangan Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember
- c. Memiliki tanggung jawab penuh terhadap perkembangan Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember

Agar data yang akan diraih mencapai data yang objektif dan lengkap, maka diperlukan informan pendukung sebagai data penunjang. Informan pendukung dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu informan pendukung utama dan informan pendukung biasa yang kedua informan tersebut melengkapi hasil data dari informan kunci kriteria kedua informan pendukung tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan diatas, maka diperoleh informan pendukung utama dalam penelitian ini adalah:

- a. Tercatat sebagai pengurus Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember
- b. Sebagai pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh ketua penyelenggara
- c. Memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan Pendidikan Bagi Anak Jalanan

Sedangkan kriteria informan pendukung biasa dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai peserta kegiatan pelatihan Anak Jalanan (LIPOSOS) Kabupaten Jember
- b. Sebagai penyalur aspirasi, kritik, serta saran kepada pengurus
- c. Sudah merasakan hasil dari perkembangan kegiatan pelatihan Anak Jalanan (LIPOSOS) Kabupaten Jember

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, maka informan pendukung biasa dalam penelitian ini adalah anak jalanan yang berada di (LIPOSOS).

### **3.3 Definisi Operasional**

#### **3.3.1 Pendidikan**

Menurut Driyarkara (1945:145), inti pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda. Pada dasarnya pendidikan adalah pengembangan ketarah insani. Sedangkan Ki Hajar Dewantara (1977:20) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. Artinya, pendidikan menurut segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi tingginya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, non formal maupun informal sampai dengan suatu taraf kedewasaan tertentu.

#### **3.3.2 Pendidikan Nonformal**

Pada hakekatnya keilmuan pendidikan nonformal, baik sebagai teori maupun sebagai pengembangan program, secara lebih jelas dapat dilihat dari berbagai definisi yang berhubungan dengan konsep keilmuan pendidikan nonformal, seperti diuraikan berikut ini.

Ilmu pendidikan nonformal mempunyai landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan nonformal merupakan dasar tempat berpijak, mengkaji dan menelaah kegiatan pendidikan nonformal.

Landasan filosofis pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh landasan ideology yang dianut oleh bangsa itu sendiri. landasan filosofis Bangsa Indonesia berbeda dengan landasan philosophers pendidikan bangsa lainnya. Pancasila sebagai landasan idiologi bangsa, merupakan landasan pembangunan dan pengembangan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Melalui program pembelajaran dalam pendidikan nonformal diharapkan dapat membantu warga belajar memilih dan mengembangkan wawasan ke-Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. (Sudjana, 1989:197).

Phillip Coombs dan Manzoor (1974) dalam pemikiran dan konsepnya telah melahirkan strategi-strategi baru dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman bagi masyarakat miskin di pedesaan dalam meningkatkan kehidupan (khususnya dalam bidang ekonomi). Konsep dasar pemikiran Coombs telah tentang melahirkan konsep tentang pendidikan nonformal, informal dan formal, yang sampai saat ini menjadi acuan utama para ahli pendidikan khususnya ahli pendidikan nonformal. Salah satu buku yang terkenal berjudul memberantas kemiskinan melalui pendidikan nonformal. Juga beberapa tulisan lain yang berhubungan dengan peran pendidikan nonformal di masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

### 3.3.3 Anak Jalanan

Departemen Sosial RI (dalam <http://www.sulutnet.com/>) mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan aatau tempat- tempat umumlainnya. Sedangkan anak jalanan menurut Sudajat (1999:5) (dalam <http://www.sekitarkita.com/>).

anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan hubungan dengan orang tuanya, yaitu : *pertama*, anak yang putus hubungan dengan orang tuanya, tidak sekolah dan tinggal di jalanan (anak yang hidup di jalanan / children of the street). *Kedua*, anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, tidak sekolah, kembali ke orang tuanya seminggu sekali, dua minggu sekali, dua bulan atau tiga bulan sekali biasa disebut anak yang bekerja di jalanan (children on the street). *Ketiga*, anak yang masih sekolah atau sudah putus sekolah, kelompok ini masuk kategori anak yang rentan menjadi anak jalanan (vulnerable to be street children). Sementara itu anak jalanan menurut Yayasan kesejahteraan anak Indonesia (1999:22–24) (dalam <http://www.suaramerdeka.com/>) anak jalanan dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu : (1). Anak – anak yang tidak berhubungan lagi dengan orang tuanya (children of the street). (2). Anak–anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua. Mereka adalah anak yang bekerja di jalan (children on the street). (3). Anak-anak yang berhubungan teratur dengan orang tuanya. Mereka tinggal dengan orang tuanya, beberapa jam di jalanan sebelum atau sesudah sekolah. (4). Anak–anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun. Mereka berada di jalanan untuk mencari kerja, atau masih labil suatu pekerjaan. Umumnya mereka telah lulus SD bahkan ada yang SLTP.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah sekumpulan anak yang masih membutuhkan orang lain yang dapat memotivasi mereka agar dapat mengembangkan diri melalui pendidikan nonformal seperti keterampilan dan pelatihan yang dimiliki sehingga menjadi bekal hidup dimanapun mereka berada.

#### 3.3.4 Tujuan Penelitian

- a. Tujuannya yaitu untuk “mendeskripsikan” bagaimana pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak jalanan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember.
- b. Tujuannya yaitu untuk “mendeskripsikan” faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pendidikan nonformal bagi anak jalanan di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

### 3.3.5 Manfaat Penelitian

#### a. Bagi Peneliti

- 1). Dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan, sikap, nilai - nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan di masa depan
- 2). Membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan nonformal

#### b. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat mengamalkan tri dharma perguruan tinggi (Darma penelitian) sekaligus menunjukkan eksistensi universitas dalam bidang pendidikan. Dan juga peningkatan wawasan keilmuan berkaitan dengan pendidikan Nonformal

#### Bagi Program Studi PLS

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pengembangan dan perluasan berkenaan dengan wawasan keilmuan PLS serta menunjukkan eksistensi PLS ke dunia luar.

#### d. Bagi penyelenggara pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan (LIPOSOS)

Hasil penelitian ini akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan evaluasi diri program pendidikan Nonformal yang sudah dilaksanakan. Yang kemudian dapat dijadikan titik tolak dalam upaya pengembangan program di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember.

#### e. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian bagi pemerintah dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan Nonformal yang merupakan salah satu pengembangan diri pendidikan luar sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas pendidikan Nonformal bagi anak jalanan yang berada di lingkungan pondok sosial (LIPOSOS).

### 3.3.6 Penerapan Fungsi Manajemen

Manajemen sangatlah penting didalam proses menggerakkan organisasi, karena dengan menggunakan manajemen yang akurat maka tujuan organisasi dapat cepat tercapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari kemampuan para manager dalam menggerakkan organisasi yang bersangkutan secara optimal. Manusia mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan. Menurut Barnard (dalam kertonegoro, 1994:18) menyatakan bahwa manusia berkelompok dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang tidak bisa mereka capai secara individu. Dalam memenuhi kebutuhan serta tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan motivasi, kerjasama dan keinginan yang sama untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai tidak terlepas dengan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang telah dibuat. Dalam mencapai tujuan yang ingin diharapkan, tidak terlepas dengan proses manajemen yang bagus serta melaksanakan atau menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Penerapan fungsi manajemen disini maksudnya adalah bagaimana seorang manajer pendidikan non formal bagi anak jalanan (ketua penyelenggara) dalam mencapai tujuan yang diharapkan mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen sehingga dapat mengembangkan kelompok kegiatan pendidikan non formal bagi anak jalanan dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen tersebut menurut Seagian (1992:44) adalah 1). Perencanaan, 2). Pengorganisasian, 3). Penggerakan, 4). Pengawasan, serta 5), penilaian. Kelima fungsi manajemen tersebut dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana atau unsur-unsur manajemen yang telah ada. Menurut Hasibuan (2006:9) ada enam unsur manajemen yang harus diperhatikan yaitu: *man, money, method, machine, material, dan market yang keenam unsur manajemen* tersebut merupakan sarana dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga penerapan manajemen berjalan sesuai yang diharapkan.

### 3.3.7 Pengembangan Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan



Pendidikan adalah agen pembangunan dan agen perubahan. Tanpa pendidikan, tidak akan ada pembangunan, pun tidak ada perubahan. Pembangunan yang kita lihat disekitar kita adalah salah satu buah yang kita petik dari apa yang dinamakan pendidikan. Karena itu, pendidikan menjadi hal penting dalam kehidupan semua orang. Tidak heran, jika ADB (Asian Development Bank) yang selama ini juga berkiprah mendanai sejumlah pendidikan nonformal untuk rakyat miskin di berbagai daerah di Asia, menegaskan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai hasil yang sempurna, pengembangan, dan kedamaian. ([www.google.com/proses](http://www.google.com/proses) manajemen, diakses 11 januari 2010)

Jalur pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan yang sangat berperan dalam pembangunan. Sesuai fungsi pendidikan non formal yaitu sebagai pelengkap, pengganti, dan penambah dari pendidikan formal. Oleh karena itu, keberadaan kelompok kegiatan pendidikan non formal bagi anak jalanan sebagai salah satu program pendidikan non formal harus dikembangkan sehingga memiliki kompetensi, dan memiliki mutu pendidikan nasional sehingga menjawab keraguan terhadap eksistensi pendidikan non formal. Jika kelompok kegiatan pendidikan non formal bagi anak jalanan dikembangkan dengan baik sesuai dengan aturan fungsi manajemen, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan sarana prasarana, memiliki lulusan yang kompeten, serta memiliki daya tarik bagi calon peserta didik sehingga meningkatkan kuantitas peserta didik.

### **3.4 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian sering disebut juga dengan desain penelitian yang merupakan suatu kegiatan yang dibuat untuk memecahkan masalah sehingga akan diperoleh data valid sesuai dengan tujuan penelitian. Rancangan penelitian atau desain penelitian berisi uraian tentang langkah-langkah yang ditempuh atau komponen-komponen yang harus ada untuk meraih hasil yang hendak dicapai (pedoman karya tulis Ilmiah, 2009:23). Sedangkan menurut Arikunto (2002:45) menjelaskan bahwa "desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai acuan-ancuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini dirancang dengan penelitian yang bersifat non eksperimental dan berjenis deskriptif kualitatif. Bersifat non eksperimental karena tidak dilakukan percobaan atau eksperimen pada suatu obyek penelitian, akan tetapi hanya ingin mengetahui mengenai proses pelaksanaan Pendidikan Anak Jalanan (LIPOSOS), pendidikan masyarakat Anak Jalanan dan apa manfaat yang didapat oleh para Anak Jalanan setelah mengikuti kegiatan pelatihan bagi anak Jalanan yang dilakukan oleh (LIPOSOS), Kabupaten Jember. Jenis penelitian deskriptif kualitatif artinya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif yang dikemukakan Sudjana (1995:197-200) ada lima ciri pokok yaitu:

- a. menggunakan lingkungan ilmiah sebagai sumber data langsung;
- b. bersifat deskripsi analitik karena data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar;
- c. lebih menekankan proses daripada hasil;
- d. bersifat induktif, pada penelitian kualitatif tidak dimulai deduksi teori tetapi dimulai dari lapangan yaitu fakta empiris atau induktif; dan
- e. mengutamakan makna.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) memilih masalah; 2) studi pendahuluan; 3) merumuskan masalah; 4) memilih pendekatan; 5) menentukan sumber data; 6) menentukan dan menyusun instrument; 7) mengumpulkan data; 8) analisis data; 9) menarik kesimpulan; 10) menyusun laporan.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan maksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat, dimana metode-metode yang digunakan memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Menurut Arikunto (2002:127), metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

Adapun metode yang digunakan dalam peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. wawancara;
- b. Observasi; dan
- c. Dokumentasi

### 3.5.1 Metode wawancara

Metode wawancara atau interview dilakukan untuk memperoleh informasi data yang dibutuhkan dari informan. Menurut Arikunto (2002:72), wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan Sugiyono (2005:72) menyatakan bahwa interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.

Adapun jenis wawancara atau interview menurut Arikunto (2006:127) adalah:

- a. wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengikat akan data yang dikumpulkan;
- b. wawancara terpimpin, dimana wawancara dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dengan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur;
- c. wawancara bebas terpimpin, yang merupakan kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin.

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, dengan pedoman wawancara terlampir pada lampiran 4. Adapun data yang ingin diraih sebagai antara lain Pendidikan Anak Jalanan di (LIPOSOS) Jember, latar belakang berdirinya pendidikan non formal bagi anak jalanan (LIPOSOS), penerapan fungsi manajemen dalam mengembangkan Pendidikan Bagi Anak Jalanan (LIPOSOS), kendala yang dihadapi dalam menerapkan Bagi Anak Jalanan (LIPOSOS).

### 3.5.2 Metode Observasi

Menurut Arikunto (2006:156) di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Menurut Arikunto (2006:157), observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

- a. observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrument pengamatan;
- b. observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrument pengamatan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi sistematis.

- a. Metode ini bersifat efektif dan efisien
- b. Mudah dilaksanakan karena pedoman yang jelas
- c. Terhindar dari kemungkinan melebarnya masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis, yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Observasi dalam tidak melibatkan langsung dalam yang dilakukan, namun sistematisnya adalah untuk memperoleh data dengan mudah, data tersebut antara lain:

- a. jumlah pendidikan nonformal bagi Anak Jalanan yang tertampung di Liposos Kabupaten Jember
- b. jumlah Tutor pendidikan non formal bagi Anak Jalanan yang berada di Liposos Kabupaten Jember
- c. lokasi pendidikan non formal bagi anak jalanan Liposos Kabupaten Jember
- d. kondisi sarana dan prasarana Pendidikan non formal bagi Anak Jalanan di Liposos Kabupaten Jember

### 3.5.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lainnya (Arikunto,

1996:263). Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh profil lembaga; denah lokasi penelitian; bagan dan struktur organisasi; dan foto – foto yang dapat dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

### **3.6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data**

#### **3.6.1 Pengolahan Data**

Penelitian kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini mengajak seseorang untuk mempelajari suatu masalah yang diteliti secara mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya. Dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari beberapa tahapan.

Menurut Moleong (2005:327-330) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga tahap.

- a. Perpanjangan keikutsertaan artinya dalam penelitian menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menemukan data yang diperlukan dan meningkatkan kepercayaan data yang diperlukan. Artinya penelitian dilakukan secara berkelanjutan sampai mendapatkan data yang diinginkan.
- b. Ketekunan pengamatan artinya berusaha menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan dengan isu yang sedang dicari dan memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. Triangulasi artinya tehnik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Dalam hal ini peneliti membandingkan keadaan atau informasi yang telah di dapat dengan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan data yang akurat. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
  - 1). membandingkan apa yang dikatakan orang dengan pendapat pribadi;
  - 2). membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
  - 3). membandingkan isi wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Tehnik triangulasi menurut Sugiyono (2005:83) dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. triangulasi teknik artinya peneliti dalam melakukan pengecekan data menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama;
- b. triangulasi sumber artinya peneliti dalam melakukan pengecekan data menggunakan sumber yang berbeda-beda akan tetapi menggunakan teknik yang sama untuk mendapatkan data yang valid.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu selain mengadakan wawancara dengan informan kunci (pengelola), peneliti juga membandingkan atau mengecek kembali informasi yang telah diperoleh dengan mengadakan wawancara kembali dengan informan pendukung (kepala dan staff (LIPOSOS)).

### 3.6.2 Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang paling menentukan untuk menyusun dan mengolah data yang terkumpul, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk eksplorasi dan kualifikasi, memberikan gambaran atau penegasan nsuatu konsep dan fenomena sosial. Menurut Nazir (1999:405) menyatakan bahwa analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah sebab dengan adanya analisis data tersebut akan memberikan arahan dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian. Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2005:91-95), analisis data dilakukan melalui 3 tahapan yaitu: (1). tahap reduksi adalah proses pemilihan informasi yang relevan dan layak untuk disajikan dari informasi yang telah terkumpul demikian banyak dan kompleks. Proses pemilihan informasi ini difokuskan pada informasi yang mengarah pada pemecahan masalah. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah memusatkan perhatian pada data lapangan yang terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data

yang terpilih disederhanakan, dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat atau ringkasan, (2). tahap penyajian data adalah data yang disajikan secara sistematis dan dalam konteks yang utuh sehingga akan lebih mudah dalam memahami dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan dengan penyajian data akan dapat dipahami apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya, hasil teks naratif tersebut diringkas. Kemudian, peneliti menyajikan informasi hasil penelitian berdasarkan pada susunan yang telah diabstraksikan, (3). tahap verifikasi (penyimpulan) adalah sebagai jalinan waktu antara sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Pada tahap ini peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Disamping menyandarkan pada klarifikasi data, peneliti juga memfokuskan pada abstraksi data. Setiap data yang menunjang komponen, diklarifikasi kembali dengan informan dilapangan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat kesimpulan atas data, maka pengumpulan data untuk komponen tersebut siap dihentikan.

## BAB 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi  $6^{\circ} 27' 9''$  sampai dengan  $7^{\circ} 14' 35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 59' 6''$  sampai  $8^{\circ} 33' 56''$  Lintang Selatan. Bentuk dataran yang subur pada bagian yang subur pada bagian tengah dan selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta samudera Indonesia sepanjang batas selatan dengan Pulau Nusa Barong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang ada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dikawasan Timur Jawa Timur.

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi ekonomi, potensi daerah, sosial ekonomi dan sosial politik, budaya serta sumber daya manusia. Kondisi objektif yang demikian dapat mengungkapkan bagai karakteristik sumber daya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan sosial, ekonomi dan budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetisi daerah, sekaligus agama permasalahan yang dihadapinya. Batas Wilayah Kabupaten Jember meliputi:

- a. sebelah Barat : Kabupaten Lumajang
- b. sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso
- c. sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- d. sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah  $3.293,34 \text{ km}^2$  atau  $329.333,94 \text{ Ha}$ . Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember diwilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan dibagian utara merupakan daerah perbukitan dan gunung-



gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir semuanya pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memiliki peluang bagi pendatang untuk lomba-lomba mencari bertahan hidup di daerah ini. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah dari Suku Jawa dan Madura, disamping itu masih dijumpai suku-suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Kabupaten Jember dinamsi, kreatif, sopan dan ramah tamah.

#### 4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS)

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 tahun 2002 merupakan awal dari berdirinya LIPOSOS pada tahun 1984 di bawah koordinasi Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 1991 berubah nama menjadi Sasana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (SRPGOT), kemudian pada tahun 1995 berubah lagi menjadi Panti Sosial Bina Karya (PSBK). yang masioh dibawah koordinasi Kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah pada tahun 1999 sampai tahun 2000 dimana Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur Dilebur dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur termasuk juga dengan unit pelaksana Teknisnya. Berdasarkan tentang tugas, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Unit Pelakasana Teknis dinas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maka Panti Sosial Bina Karya (PSBK) berubah menjadi Balai Pemulihan Sosial Bina Karya (BPSBK). Pada tahun 2009 sampai dengan sekarang, berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Keda Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Jawa Timur balai Pemulihan Sosial Bina Karya (BPSBK) berubah lagi sampai sekarang menjadi Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS).

#### **4.2 Profil Liposos (Lingkungan Pondok Sosial) Dinas Sosial Kabupaten Jember**

#### 4.2.1 Mengenal LIPOSOS

Liposos atau Lingkunga Pondok Sosial terletak di Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lokasinya cukup strategis, sekitar 3km dari pusat kota dan tidak jauh dari jalan Gajah Mada yang merupakan jalan utama di Kabupaten Jember . Liposos dibangun diatas lahan seluas 9885 m persegi. Liposos sebagai tempat penampungan, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), termasuk pembinaan mental khususnya PGOT, penyandang Cacat dan Tuna Susila.

Liposos merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, saat ini kondisinya kurang memadai dan perlu ditingkatkan.

#### 4.2.2 Kedudukan, Tujuan dan Fungsi

##### a. Kedudukan

Kedudukan Liposos yaitu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dari Dinas Sosial Kabupaten Jember. Hal itu dikarenakan seiring bertambahnya sarana dan juga prasarana yang ada di Liposos maka sejak tahun 2009 maka Liposos ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Dinas Sosial Kabupaten Jember.

##### b. Tujuan

Terlaksananya pelayanan yang lebih optimal, efektif dan tepat sasaran kepada PMKS dan PSKS khususnya PGOT, Penyandang Cacat dan Tuna Susila (WTS) yang berdampak terbebasnya mereka dari kondisi ketunaan sosial, sehingga memiliki kembali kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, berguna, berkualitas, produktif dan lebih terhormat.

##### c. Fungsi

- 1). Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dan PSKS;
- 2). Sebagai pusat informasi dan konsultasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- 3). Sebagai pusat bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS dan PSKS (Karang Taruna, PSM, ORSOS, WKSBM, Karang Werda, WPKS)

termasuk pembinaan mental khususnya bagi PGOT, Penyandang Cacat dan Tuna Susila (WTS);

Pengembangan lebih lanjut Liposos nantinya sebagai tempat kegiatan dan pelatihan yang menyangkut PMKS dan PSKM. Dalam 2 (dua) Tahun terakhir, Liposos sudah mulai difungsikan sebagai tempat bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan Gepeng, Penyandang Cacat dan WTS, penampungan dan pembinaan Gepeng hasil razia, seperti pembinaan Gepeng setelah Razia, ketrampilan Rias bagi WTS.

#### 4.2.3 Kondisi Sarana Prasarana

Sarana Prasarana di Liposos terdiri dari beberapa gedung, yaitu : Aula Liposos, Gedung Loka Bina Karya (LBK), Asrama LBK, Rumah Singgah dan Dapur Umum.

Sarana Prasarana Liposos

NO	JENIS SARANA PRASARANA	DAYA TAMPUNG	KONDISI
1	AULA LIPOSOS	100 Orang	Cukup Baik
2	GEDUNG LOKA BINA KARYA	20 Orang	Cukup Baik
3	ASRAMA LBK	10 Orang	Cukup Baik
4	RUMAH SINGGAH BARU (2007)	20 kamar/40 Orang	Baik
5	DAPUR UMUM	1 ruang	Baik
6.	LAPANGAN OLAH RAGA	1 buah	Baik
7.	TEMPAT PARKIR SEPEDA + MOBIL	30 unit	Baik

Tabel 4.1. kondisi sarana dan prasarana di Liposos tahun 2012

Penambahan sarana prasarana baru guna meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS, khususnya PGOT, Penyandang Cacat dan Wanita Tuna Susila (WTS). Adapun sarana prasarana yang diusulkan melalui dana APBN Depsos RI meliputi : Pembangunan Kantor Liposos, Pembangunan Rumah Dinas, Gudang, Mushola, Pagar Keliling, Sumur Bor dan Tandon, Saluran Drainase dan Pos

Jaga, lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah untuk kedepan sarana LIPOSOS akan dilengkapi peralatan ketrampilan sebagai tempat pelatihan ketrampilan bagi PMKS dan PSKS.

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	LOKASI KERJA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	DINAS SOSIAL	20	12	32
2	UPT LIPOSOS	1	-	1
3	TENAGA KONTRAK	1	1	2
JUMLAH		22	13	35

Tabel 4.2. Data Pegawai di dinas sosial dan Liposos

Kondisi Pegawai Berdasar Golongan / Ruang

No	KANTOR/LOKASI	GOL / RUANG				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	DINAS SOSIAL	5	18	8	2	33
2	UPT LIPOSOS	1	-	-	-	1
JUMLAH		6	18	8	2	34

Tabel 4.2. Pegawai menurut golongan

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KANTOR/LOKASI	PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	DINAS SOSIAL		4	9			1	13	5		32
2	UPT LIPOSOS		-						1		1
3	KONTRAK		-								2
JUMLAH			4	9			1	13	6		35

Tabel 4.3. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

#### 4.2.4 Visi dan Misi Dinas Sosial

Visi

Terseleggaranya pelayanan dibidang kesejahteraan sosial, rehabilitasi dan bantuan sosial secara utuh dan mandiri

Misi

Mendorong tumbuhnya swadaya sosial dan memperdayakan kelompok penyandang masalahkesejahteraan sosial.

#### 4.2.5 Kondisi Penduduk Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil laporan penduduk Menurut data BPS Kabupaten Jember tahun 2012 penduduk Jember sejumlah 2.163.732 dengan jumlah penduduk miskinnya 491.728 dan jumlah pengemis yang tercatat tahun 2008 sejumlah 147 jiwa. Jumlah penduduk di Kabupaten Jember dari 31 kecamatan yang mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi terjadi terjadi pada wilayah kota seperti Kecamatan Kaliwates, Sumber Sari, dan patrang dengan tingkat kepadatan masing-masing 3.762,41 Jiwa/km, padahal ketiga wilayah tersebut memiliki prosentase luas wilayah relatif kecil terhadap luas Kabupaten Jember, dengan proporsial luas masing-masing sebesar 0,76% 1,12% dan 1,12%. Selain itu Kecamatan Tempurejo dengan proporsi luas wilayah 15,93% dari luas wilayah Kabupaten Jember, menjadi Kecamatan yang memiliki tingkat kependudukan terendah, yaitu 132,38 Jiwa/km. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terjadi tidak serta merta disertai dengan pemerataan penyebaran penduduk.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sebanyak 237.700 KK, dengan perincian 34.654 KK adalah Rumah Tangga Sangat Miskin dan 109.496 KK adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) sebanyak 372.354 KK

#### 4.2.6 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan masih minim, rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendah yang

kualitassumber daya manusianya dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya ditengah persaingan yang semakin ketat seperti saat ini.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Jember pada penduduk usia 5 tahun keatas tahun 2010, menurut data dalam angka 2011 adalah sebagai berikut;

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Jember

NO	Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	Tidak tamat/belum tamat	937.424	46.80
2	SD	681.603	34,03
3	SLTP	193.804	9,67
4	SLTA	159.827	7,98
5	Akademi/Perguruan Tinggi	29.916	1,49
6	Tidak terjawab	64	0,03
	<b>Jumlah</b>	<b>2.002.638</b>	<b>100</b>

Tabel 4.4. data pendidikan penduduk Kabupaten Jember (Data sekunder 2011)

Dari data diatas menunjukkan walaupun tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Jember sangat minim, akan tetapi Kabupaten Jember memiliki beberapa perguruan tinggi dan salah satunya sebuah Universitas Negeri untuk wilayah Jawa Timur.

#### 4.2.7 Perekonomian

Mayoritas penduduk Kabupaten Jember penghasilan utama sebagai petani, sektor pertanian sebagai penunjang utama sektor perekonomian Kabupaten Jember secara agroklimatologi merupakan daerah yang subur, terutama untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kondisi alam yang terbentang memungkinkan kabupaten Jember telah lama dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Jenis produk pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai dan tembakau yang merupakan andalan hasil pertanian orang-orang Kabupaten Jember. Sektor perkebunan juga terkenal seperti kakau, coklat dan sebagainya. Diwilayah kelautan, Kabupaten Jember juga batasan dengan laut

selatan. Mata pencaharian sebagai nelayan di Kabupaten Jember juga tinggi, pasalnya ada sebagian hasil penangkapan nelayan merupakan bahan ekspor nasional.

#### 4.2.8 Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas pemerintah bertahan yang terdapat di Kabupaten Jember dan yang gerak pada wilayah yang ada kaitannya pada penelitian yang peneliti lakukan. Lokasi Dinas Sosial Kabupaten Jember di Jl. PB Sudirman No. 38 Jember (eks. Kantor Litbang Kabupaten Jember) Telp 0331-487766, dengan menempati lahan bangunan seluas lebih kurang 400 m/segi. Dengan batas-batas adalah:

- a. sebelah Selatan : Batasan dengan Kecamatan Sumber Sari
- b. sebelah Barat : Batasan dengan Kecamatan Kaliwates
- c. sebelah Timur : Batasan dengan Kecamatan Arjasa
- d. sebelah Utara : Batasan dengan Kecamatan Jelbuk

Karena secara umum kondisi bangunan Dinas Sosial belum memadai karena kegiatan rapat/pertemuan dengan para staf, mitra kerja, organisasi sosial, karang taruna, dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial basis masyarakat, atau para penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan menggunakan aula yang relatif sempit, selain itu Dinas Sosial mempunyai asset bangunan berupa Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) dan Loka Bina Karya (LBK) kondisi kedua bangunan tersebut masih memprihatinkan sehingga belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya dan untuk sementara terkadang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Industri Jember. Dan LIPOSOS itu, yang kemudian akan dijadikan sebagai lokasi penelitiannya.

#### 4.2.9 Uraian Tugas Struktur Organisasi Dinas Sosial kabupaten Jember

(Sesuai peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008).

##### a. Kepala Dinas Sosial

Adalah pimpinan dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan kesejahteraan

sosial, rehabilitasi sosial, dan penyelenggaraan bantuan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan program pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Terdiri dari:

1). Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kehumasan, perlengkapan, dan keprotokolan dan tugas lain yang diberikan sekretaris

2). Kepala Sub Bagian Perencanaan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran dan laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3). Kepala Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan dan menyusun RAPBD Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

4). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan fakir miskin dan orang terlantar, PSKS, pahlawan dan perintis kemerdekaan serta pelestarian nilai-nilai perjuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Terdiri dari:

1). Kepala Seksi Penyuluhan Dan Bimbingan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan.

2). Kepala Seksi Kelembagaan Dan kemitraan

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan kelembagaan sosial, peningkatan keterampilan kelembagaan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan.

3). Kepala Seksi Keperintisan Dan Kepahlawanan

mempunyai tugas menyiapkan data pahlawan dan perintis kemerdekaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan.



4). Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan koordinasi dan melakukan kegiatan dibidang bina pelayanan dan rehabilitasi sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Terdiri dari:

1). Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

mempunyai tugas melaksanakan program rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan terhadap tuna sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

2). Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Dan Lansia

mempunyai tugas melaksanakan pendataan anak dan lansia, melaksanakan pembinaan terhadap anak dan lansia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

3). Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program rehabilitasi penyandang cacat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

4). Kepala Bidang Perlindungan Sosial

Mempunyai tugas pembinaan advokasi perlindungan sosial. Melaksanakan pengawasan dan kerjasama terhadap organisasi sosial swasta, usaha-usaha masyarakat dibidang kesejahteraan sosial dan pemberian sumbangan/bantuan kepada mereka yang tidak berdaya dari merosotnya taraf kesejahteraan sosial dan tindakan kekerasan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Terdiri dari:

1). Kepala Seksi Kesejahteraan Korban bencana alam dan sosial, dan sumbangan sosial mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan dan penyaluran bantuan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan Sosial

2). Kepala Seksi Advokasi Dan perlindungan Sosial

mempunyai tugas mengidentifikasi kondisi sosial, koordinasi terkait perlindungan sosial, pembinaan dan bimbingan sosial dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial

3). Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Orang Terlantar

mempunyai tugas mengumpulkan bahan bimbingan kesejahteraan sosial, koordinasi dengan instansi terkait dengan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Sosial

4). Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas dalam urusan rumah tangga dibidang kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### 4.2.10 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember

Dinas Sosial Kabupaten Jember mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan bantuan sosial.

Dinas sosial Kabupaten Jember mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan, merencanakan kebijaksanaan, pembinaan dan perijinan dibidang sosial
- b. melaksanakan kebijaksanaan di bidang usaha kesejahteraan sosial
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha sosial, bantuan sosial, dan organisasi sosial
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Kabupaten Jember.

#### 4.2.11. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada dasarnya deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran daerah atau lokasi penelitian ini dilaksanakan. Penggambaran lokasi daerah penelitian dengan mengambil data sangat diperlukan utamanya untuk memperjelas hasil mengumpulkan data dari observasi dan wawancara yang diperoleh dilapangan.

Lokasi liposos ini jarang orang yang mengetahuinya karena memang tempatnya sebelum memasuki wilayah perkotaan, di belakang Hotel Ardi Candra

Kabupaten Jember dan samping area persawahan. Bangunan rumah atau tempat tinggal berjejer seperti perumahan, namun yang membedakan luas bangunan itu kecil karena antara ruang depan, kamar dan dapur, terkadang yang membatasi itu hanya papan triplek. Atap ataupun dinding yang kayu masih juga menempel di bangunan itu, dikala hujan kadang ada juga yang bocor. Di area itu juga terdapat sarana prasarana lain yaitu gedung yang dipakai buat pelatihan dan juga aula. Batasan gedung tersebut ada pagar besi memanjang, sepanjang bangunan itu juga, itu yang membatasi dengan jalan yang dilewati buat area persawahan.

Liposos atau Lingkungan Pondok Sosial terletak di Jl. Tawes No 203 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Lokasinya sekitar 3 km dari pusat kota dan tidak jauh dari jalan raya, liposos dibangun diatas lahan seluas 9885 m/seg. Liposos sebagai tempat penampungan, peletihan keterampilan dan pembinaan bagi PMKS dan PSKS, termasuk pembinaan mental khususnya PGOT, penyandang cacat dan tuna susila. Liposos merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember.

### 4.3 Keadaan Penghuni Liposos

#### 4.3.1 Jumlah Penghuni Menurut Daerah Asal

Penghuni liposos Kabupaten Jember tidak semua asal dari kabupaten jember saja, tetapi ada dari beberapa mereka yang asal dari luar dari kota Jember. Dilihat dari daerah asal adalah sebagai berikut:

Jumlah Penghuni Liposos menurut daerah asal

NO	Daerah Asal	Frekuensi	Prosentase
1	Jember	45	75
2	Probolinggo	3	5
3	Malang	1	1,67
4	Pasuruan	3	5
5	Banyuwangi	1	1,67
6	Bondowoso	1	1,67
7	Lumajang	2	3,33

8	Kediri	2	3,33
9	Situbondo	1	1,67
10	Atambua - NTT	1	1,67
	Jumlah	60	100

Tabel 4.5. Jumlah penghuni Liposos menurut daerah asal

Sumber data sekunder; diolah dari data Liposos Kabupaten Jember 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penghuni Liposos menurut daerah asal asal dari 10 kota/kabupaten. Dari jumlah penghuni liposos orang/jiwa, Kabupaten Jember sendiri terdapat 45 orang/jiwa atau 75% dari jumlah penghuni liposos. Yang asal dari kota Probolinggo dan pasuruan ada 3 orang atau 5% dari jumlah penghuni Liposos. Daerah Lumajang dan Kediri ada 2 orang/jiwa atau 3,33% dari jumlah penghuni liposos. Daerah Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Atambua-NTT masing-masing terdapat 1 orang/jiwa atau 1,67% dari jumlah penghuni liposos.

Penghuni liposos berdasarkan daerah asalnya sebanyak 10 kota/kabupaten seindonesia untuk liposos untuk Kabupaten Jember. Namun secara mayoritas atau kebanyakan, mereka asal dari kabupaten Jember sendiri. Hal ini menunjukkan Kabupaten Jember masih ada dibawah garis kemiskinan secara kewilayahan. Dari tabel diatas juga penghuni liposos tidak hanya dari daerah sekitar Kabupaten Jember saja, tapi ada juga dari luar daerah tapal kuda, sebut saja ada yang dari malang, Kediri, bahkan mereka (penghuni liposos) ada juga yang dari Atambua-NTT. Hal ini menjadi miniatur bahwa penduduk Indonesia masih tergolong miskin.

Memang dari sumber Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, adanya tempat liposos ini terdapat tiga wilayah. Salah satunya Jember, setelah Surabaya, dan Malang. Hal ini dapat dijadikan refrensi bahwa PMKS yang tinggal diliposos latar belakangnya mereka yang dulunya orang-orang urban yang nekat untuk pergi ke kota lain dari kotanya sendiri, tanpa ada bekal upah keterampilan atau skill yang dimiliki oleh orang tersebut.

#### 4.3.2 Penghuni Liposos Menurut Faktor Penyebab Masuk Liposos

Penghuni liposos di Kabupaten Jember Kalau dilihat dari faktor penyebab masuk liposos Kabupaten Jember, dari 19 KK atau 60 orang/jiwa mayoritas semuanya asal dari latar belakang yang menjadikan mereka ada di liposos tersebut. Awal dari mereka yang terkena razia, pada saat mereka keliaran di jalanan, tidur di depan toko-toko perkotaan, di bawah jembatan dan sebagainya yang tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.

PMKS dari jumlah 28 kategori, ada beberapa yang latarbelakang tersebut, semuanya latarbelakang pengemis dan gelandangan. Pengemis dan gelandangan ini, baik secara kolektif ataupun perkepala keluarga mereka datang ataupun razia yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember.

#### 4.3.3 penghuni Liposos Menurut Umur

Penghuni liposos Kabupaten Jember menurut umur semua orang/jiwa sebagai berikut:

Penghuni lioposos berdasarkan umur

No	Umur	Frekuensi	Prosentase
1	1 - 10	13	21,67
2	11 - 20	12	20
3	21 - 30	7	11,67
4	31 - 40	9	15
5	41 - 50	7	11,67
6	>51	12	20
	Jumlah	60 orang	100

Tabel 4.6. penghuni liposos berdasarkan umur

Sumber : data sekunder, diolah dari data liposos Kabupaten Jember 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penghuni liposos berdasarkan umur adalah ; Usia 1-10 Tahun terdapat 13 oarang/jiwa atau 21,67%. Usia 11-20 Tahun terdapt 12 orang/jiwa atau 20%. Usia 21-30 Tahun terdapat 7 orang/jiwa atau

11,67%. Usia 31-40 Tahun terdapat 9 orang/jiwa atau 15%. Usia 41-50 Tahun terdapat 7 orang/jiwa atau 11,67%. Usia 50 Tahun keatas terdapat 12 orang/jiwa atau 20% dari jumlah keseluruhan penghuni liposos.

Dilihat dari tabel penghuni liposos berdasarkan umur. Usia seseorang tidak menetup kemungkinan apakah mereka (penghuni) itu muda, atau anak-anak, ataupun orang dewasa, dari tabel diatas mereka yang usianya cenderung masing produktif , juga banyak secara presentase penghuni yang usia produktif sangat banyak. Dan ini menunjukkan untuk golongan usia produktif harus dibekali pekerjaan yang layak agar dikemudian hari tidak seperti orang tuanya. Di usia 45 tahun keatas juga terdapat 20% lebih dari penghuni liposos. Ini menunjukkan bahwa penghuni liposos kebanyakan sudah tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja keras untuk bekal hidupnya.

#### 4.3.4 Jumlah Penghuni Liposos Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penghuni liposos menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	29	48,33
2	Perempuan	31	51,67
	Jumlah	60	100

Tabel 4.7. penghuni liposos berdasarkan jenis kelamin

Sumber: data sekunder, diolah dari data liposos Kabupaten Jember 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari 60 orang /jiwa penghuni liposos, terdapat jenis kelamin laki-laki 29 Orang/jiwa atau 48,33% dan jenis kelamin perempuan terdapat 31 orang/jiwa atau 51,67% dari jumlah keseluruhan penghuni liposos.

Penghuni liposos antara laki-laki dan perempuan tidak jauh beda jumlahnya. Perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yang selisihnya pun hanya 2 orang/jiwa dari jumlah total penghuni liposos 60 orang/jiwa. Penghuni liposos kalau dilihat menurut jenis kelamin, tidak pengaruh. Ini dilihat dari prosentase yang didapat dari data. Dan hal ini menunjukkan bahwa laki-laki

dan perempuan sama saja tergantung seseorang itu menjalani hidupnya sehari-hari bagaimana. Dan dilihat dari tabel diatas mereka kebanyakan sudah suami yang menempati liposos tersebut. Laki-laki yang notabene kebanyakan, bahwa konstruk sosial laki-laki itu mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari pemenuhan nafkah pada keluarganya masing-masing. Mungkin ketika seorang laki-laki jalan sebagaimana konstruk sosial yang ada dimasyarakat benar-benar dijalankan, mereka akan total. Namun keluarga penghuni liposos logika fikirnya masif naif, yaitu menerima apa adanya.

#### 4.3.5 Penghuni Liposos Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penghuni liposos berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	SD/Sederajat	9	15
2	SLTP	2	3,33
3	SLTA	0	0
4	Belum sekolah/tidak sekolah	49	81,67
	Jumlah	60	100

Tabel 4.8. penghuni liposos berdasarkan tingkat pendidikan

Sumber: data sekunder, diolah dari data liposos Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas bahwa tingkat pendidikan penghuni liposos yang sedang menempuh SD 9 orang/jiwa atau 15%, menempuh SLTP 2 orang/jiwa atau 3,33%, menempuh SLTA 0 orang/jiwa atau 0%, yang belum sekolah/tidak sekolah terdapat 49orang/jiwa atau 81,67% dari jumlah penghuni liposos keseluruhan.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya masih rendah dan kurang diperhatikan. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan rendah maka angka kehidupannya juga dibawah garis kemiskinan. Agenda departemen pendidikan nasional bahwa pendidikan dilakukan dengan namanya wajib belajar 9 Tahun, namun hal ini tidak terjadi pada penghuni liposos.

Hal ini dapat terlihat dari jumlah mereka yang menempuh pendidikan, dari total penghuni liposos hanya 18% yang menempuh jenjang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan juga sebagai pengaruh tentang keadaan mereka tinggal diliposos. Dan menunjukkan logika pikir orang yang menempuh pendidikan dengan yang belum/tidak menempuh pendidikan jelas mengalami pendidikan. Apalagi dari tabel diatas penghuni liposos dilihat dari tingkat pendidikan, pada level pendidikan tingkat pertama hanya 3,33%. Diperparah lagi pada level pendidikan menengah atas tidak ada yang menempuh pendidikan pada level tersebut. Padahal level pendidikan menengah atas ini, dari segi psikologi perkembangan masuk pada usia produktif, yakni mereka yang mengalami stagnasi pikir ataupun tidak berkembang maka untuk masa depannya sulit untuk memperbaiki perubahan pemenuhan hidupnya.

#### **4.4 Karakteristik Informan**

##### **4.4.1 Penentuan Informan**

Salah satu sumber data yang terpenting dari suatu penelitian adalah keterangan informan, yang mana tipe informan memiliki karakteristik atau ciri-ciri dan latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan untuk mengumpulkan data-data dilapangan. Dalam penelitian ini informan dipakai 2 macam, informan kunci, informan pendukung utama, informan pendukung biasa. Informan kunci adalah kepala Dinas Sosial dan juga penanggung jawab yang ada diliposos Kabupaten Jember dengan kemampuannya mengetahui semua secara mendalam tentang permasalahan yang terdapat dilapangan. Adapun yang menjadi informan pendukung utama Staf dan karyawan Dinas Sosial Kabupaten Jember hal ini yaitu petugas yang tinggal diliposos dan kepala bidang rehabilitasi sosial. Dan juga informan pendukung biasa yaitu penghuni liposos yang masih berada di liposos.

Adapun gambaran dari informan yang peneliti maksud dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut. Dari beberapa informan yang didapatkan, dapat diketahui usia paling muda adalah Jamsari 15 Tahun, kemudian berikutnya



Bambang Wahyudi 13 Tahun, kemudian Aria Dwi Novanto 14 Tahun dan Sona Eka Candra dengan usia 15 Tahun.

Dari keempat informan pendukung tersebut statusnya Masih Anak Jalanan, yang membedakan disini adalah tingkat pendidikannya yang tidak sama.

#### **4.5 Pengolahan Data Dan Analisis Data**

##### **4.5.1 Sumber Belajar**

Sihombing (2002:11) Sumber Belajar, adalah orang yang memiliki kelebihan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap tertentu, memiliki kemampuan dan mau untuk mengalihkan apa yang dimilikinya kepada warga belajar melalui proses pembelajaran, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap pada warga belajar. Sedangkan menurut Rusman (2007:64) sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Zein (2009:47) juga mengemukakan Sumber Belajar, adalah warga masyarakat yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan yang bersedia memberikan atau menularkan pengetahuan atau keterampilannya kepada orang lain melalui kegiatan/program PLS.

Di Liposos terdiri dari satu sumber belajar atau tutor yaitu pematari yang paham atau ahli dalam hal perbengkelan yaitu Bapak Agus Supaat serta masih dibantu oleh team yang didatangkan dari bengkel – bengkel terkemuka di daerah Kabupaten Jember.

#### **LAPORAN INSTRUKTUR PENGGUNAAN BAHAN LATIHAN**

<b>JENIS PELATIHA</b>	<b>: INSTRUKSIONAL PENGGUNAAN BAHAN KOMPETENSI (PBK)</b>
<b>NAMA PELATIHAN</b>	<b>: SEPEDA MOTOR A -1</b>
<b>JUMLAH JAM PELATIHAN</b>	<b>: 240 JP</b>
<b>SUMBER DANA</b>	<b>: APBD</b>
<b>PELAKSANAAN</b>	<b>: 29 – 03- 2012 sd 07 – 04 – 2012</b>
<b>TEMPAT PELATIHAN</b>	<b>: UPTD LIPOSOS Kabupaten Jember</b>

NO	HARI / TANGGAL	JAM	JML JAM LATIHAN	MATA LATIHAN	PEMAKAIAN BHN LTHAN	NAMA INSTRUKTUR
1	Kamis,29-03- 2012	I – IV	4 JP	FMD Fisik, Mental, Disiplin	-	TEAM
2	Kamis,29-03- 2012	V- VII	4 JP	KWH	Buku tulis dll	TEAM
3	Jum'at,30-03- 2012	I – VI	4 JP	FMD	Sda	TEAM
4	Jum'at,30-03- 2012	VII– VIII	4 JP	KWH	Sda	TEAM
5	Sabtu,31-03- 2012	I – IV	4 JP	T.PPAU	Sda	AGUS SUPAAT
6	Sabtu,31-03- 2012	V – VIII	4 JP	T,MKS	Sda	AGUS SUPAAT
7	Senin,02-04- 2012	I – IV	4 JP	T.MKSMT	Sda	AGUS SUPAAT
8	Senin,02-04- 2012	V – VIII	4 JP	T.OHE	Sda	AGUS SUPAAT
9	Selasa,03-04- 2012	I – IV	4 JP	T.MBE	Sda	AGUS SUPAAT
10	Selasa,03-04- 2012	V – VIII	4 JP	T.OHKR	Sda	AGUS SUPAAT
11	Rabu,04-04- 2012	I – IV	4 JP	T.OHKP	Sda	AGUS SUPAAT
12	Rabu,04-04- 2012	V – VIII	4 JP	T.OHT	Sda	AGUS SUPAAT

Tabel 4.9. hasil laporan instruktur

Keterangan Mata Latihan ( Kurikulum )

#### KELOMPOK UNIT KOMPETENSI UMUM

FMD = Fisik, Mental dan Disiplin

KWH = Kewirausahaan

#### KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

T.PPAU = Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Ukur

T.MKS = Melepas Kepala Silinder

T.MKSMT = Merakit Kepala Silinder memeriksa toleransi dan melaksanakan pengujian yang sesuai

T.OHE = Over Haul Engine

T.MBE = Merakit Blok Engine memeriksa toleransi dan melaksanakan pengujian yang sesuai

T.OHKR = Over Haul Karburator

T.OHKP = Over Haul Kopling

T.OHT = Over Haul Transmisi

Over Unit Final Drive

Over Haul Rem

Perbaikan Sistem Stater dan Pengisian

Perbaikan Pengapian

Evaluasi Latihan

#### KELOMPOK UNIT KOMPETENSI TEKNIS

Melakukan Kerjasama Tim

Membuat Laporan

Metode Pembelajaran yang digunakan yaitu 30 % TEORI dan 70 % PRAKTEK.

#### 4.5.2 Warga Belajar

Sihombing (2002:11) Warga Belajar, adalah warga masyarakat yang mengikuti program pendidikan luar sekolah (PLS) dalam sistem pendidikan nasional warga belajar disebut peserta didik warga belajar disebut subyek dalam belajar. Sedangkan menurut Zein (2009:47) Warga Belajar, adalah warga masyarakat yang mengikuti program PLS, disebut warga belajar (WB); Mereka adalah warga

masyarakat yang sedang belajar. Warga masyarakat PLS meliputi anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

NAMA PESERTA PELATIHAN SEPEDA MOTOR A -1

NO	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT
1	Jamsari	SMP	Jl. Manggis RT.01 RW.01 Wuluhan Jember
2	Abdillah Khafid	SD	Jl. Punden Utara RT.08 RW.05 Kendal
3	Aria Dwi Novanto	SMP	Jl. Kalimantan Gg.Kelinci 12 Jember
4	Bambang Wahyudi	SD	Jl. Kalimantan X 84 Bondowoso
5	Ashep Dian Suhartono	SD	RT.16 RW.08 Ajung Kab Jember
6	Hendras Putra Bagus	SMP	JL. Sukowono NO.08 Tamanan Bondowoso
7	Sona Eka Candra	SD	RT.01 RW.001 Ajung Jember
8	Bayu Ikhwan Rosadi	SD	RT. 01 RW. 02 Dukuh Dempok Wuluhan
9	Surahman	SMP	RT.04 RW.04 Banjarnegara
10	M. Nur Khafid	SMP	RT.03 RW. 04 Ambulu Jember
11	Moh.Yusup Hidayatullah	SMP	Jl. Agus salim no.89 Kaliwates Jember
12	Moh. Khoironi	SMP	RT.01 RW.07 Ambulu Jember
13	Fitra Wijaya	SD	RT.02 RW.02 Wonosari Bondowoso
14	Luthfi Ali Muthadlo	SD	Jl. Purbakala RT.12 RW.4 Bondowoso

15	Lasnuri Efendy	SD	Jl. Melati no.10 Kaliwates Jember
16	Abdul Ghofur	SMP	RT.15 RW. 05 Kutoanyar Probolinggo

Tabel 4.10. nama peserta pelatihan

Pelatihan sepeda motor A- 1 ini memiliki manfaat bagi pesertanya walaupun mereka memiliki tingkat pendidikan yang bermacam – macam.Untuk peserta pelatihan sepeda motor A- 1 memiliki tingkat pendidikan yaitu SD sebanyak 8 orang SMP sebanyak 8 orang.

#### 4.5.3 Panti Belajar

Sihombing (2002:12) Panti Belajar, adalah tempat belajar yang layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Zein (2009:49) Panti Belajar, adalah tempat belajar yang layak digunakan untuk kegiatan belajar. Jika pendidikan formal sudah menyediakan gedung sekolah, maka PLS masih amat langka yang disediakan gedung/bangunan khusus untuk kegiatan belajar.

Panti belajar merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan pelatihan sepeda motor A- 1 yang membutuhkan tempat untuk menampung serta memberikan ketrampilan maupun pembinaan bagi anak jalanan,sehingga para peserta pelatihan dapat memahami materi yang diberikan dengan baik.

Panti belajar yang digunakan dalam pelatihan sepeda motor A – 1 yaitu berada di UPTD Liposos Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl.Tawes no. Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dan tempat pelatihanya yaitu di gedung otomotif 1 dan gedung otomotif 2 semua gedung tersebut terletak di samping kantor dan gedung utama Liposos.

#### 4.5.4 Ragi Belajar

Sihombing (2002:12) Ragi Beljar, adalah sesuatu yang mampu membangkitkan semangat belajar warga belajar, sehingga proses pembelajaran terjadi: terjadi tanpa paksaan, gertakan tetapi karena kesadaran warga belajar serta kekuatan yang ada pada ragi belajar itu sendiri. Sedangkan menurut Zein

(2009:49) Ragi Belajar, warga belajar akan bersemangat mengikuti program PLS jika mendapatkan dorongan yang menyenangkan.

Ragi belajar yang dapat meningkatkan keinginan peserta untuk mengikuti pelatihan sepeda motor A- 1 yaitu pelatihan tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari – hari setelah mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan yang dimiliki peserta agar tidak menjadi anak jalanan lagi.

#### 4.5.5 Dana Belajar

Sihombing (2002:12) Dana Belajar, adalah uang atau materi lainnya yang dapat diuangkan dalam menunjang pelaksanaan program pembelajaran yang telah disusun oleh pamong belajar bersama sumber belajar dan warga belajar. Sedangkan menurut Zein (2009:50) Dana Belajar, adalah factor primer dalam penyelenggaraan program PLS. Tanpa dana yang cukup, mustahil program PLS dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Dana yang digunakan dalam pelatihan sepeda motor A – 1 bagi anak jalanan yaitu dana APBD yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember untuk pemberdayaan masyarakat.

#### 4.5.6 Kelompok Belajar

Sihombing (2002:13) Kelompok Belajar, adalah sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang, yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama, dan bersepakat untuk saling membelajarkan. Sedangkan menurut Zein (2009:48) Kelompok Belajar, adalah group atau perkumpulan dari sejumlah orang yang berstatus sebagai warga belajar, sumber belajar dan pamong belajar yang sedang mengadakan kegiatan pembelajaran.

Dalam pelatihan sepeda motor A- 1 tidak ada pembagian kelompok belajar dikarenakan mereka hanya terdiri dari 16 orang sehingga mereka berada dalam satu ruangan pembelajaran

#### 4.5.7 Program Belajar

Sihombing (2002:13) Program Belajar, adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Sedangkan menurut Zein (2009:50) Program Belajar, jika penyelenggaraan pendidikan formal dipersyaratkan adanya kurikulum, maka dalam penyelenggaraan program PLS dipersyaratkan adanya program belajar.

Program belajar terdiri dari beberapa pokok bahasan yaitu tujuan pembelajaran yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM anak jalanan sehingga mereka dapat mendirikan wirausaha dan tidak kembali ke jalanan

Isi dan cara pembelajaran yaitu dengan pemberian materi dan juga memberikan kegiatan praktek sehingga mereka lebih memahami materi yang diberikan.

Waktu Pembelajaran yaitu sesuai jadwal yang ditentukan mulai pagi hingga sore hari.

#### 4.5.8 Proses Belajar

Sihombing (2002:13) Proses Belajar, adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar. Sedangkan menurut Baharuddin (2007:16) Proses Belajar adalah serangkaian aktivitas yang terjadi pada pusat saraf individu yang belajar proses belajar terjadi secara abstrak, karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati.

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan sepeda motor A- 1 yaitu dengan memberikan pelatihan sesuai kurikulum yang telah ada dan setiap proses pembelajaran yang diterima oleh peserta pelatihan dapat atau tidaknya dipahami oleh peserta tidak dapat diketahui tetapi dapat dilihat dari nilai hasil pembelajaran.

#### 4.5.9 Hasil Belajar

Sihombing (2002:14) Hasil belajar, adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah melalui proses pembelajaran tertentu dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman

belajarnya (Sudjana, 2004:22). Sedangkan menurut Horwart dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004 : 22). Zein (2009:51) juga mengemukakan Hasil Belajar, adalah program PLS selalu berorientasi pada hasil belajar,bukan pada sertifikat kelulusan. Hasil belajar program PLS diprioritaskan pada keterampilan dan atau keahlian yang fungsional bagi kehidupan hidup sehari-hari.

Hasil pembelajaran pelatihan sepeda motor A- 1 dapat dilihat dari daftar nilai pelatihan yang tercantum di bawah ini :

N O	NAMA	MATA LATIHAN								JM L	RA TA2	KRT RIA	KE T
		TEORI				PRAKTEK							
		1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Jamsari	6	6	6	6	6	6	6	6	520	65,0 0	CKP	L
		2	2	2	2	8	8	8	8				
2	Abdillah Khafid	6	6	6	6	6	6	6	6	508	63,5 0	CKP	L
		2	2	2	2	5	5	5	5				
3	Aria Dwi N.	7	7	7	7	7	7	7	7	620	77,5 0	BAI K	L
		7	7	5	5	9	9	9	9				
4	Bamban g W.	6	6	6	6	6	6	6	6	516	64,5 0	CKP	L
		2	2	2	2	7	7	7	7				
5	Asep Dian S	6	6	6	6	6	6	6	6	524	65,5 0	CKP	L
		6	6	6	6	5	5	5	5				
6	Hendras Putra B	7	7	7	7	8	8	8	8	626	78.2 5	BAI K	L
		5	6	5	6	1	1	1	1				
7	Sona Eka C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KRG	TL
8	Bayu Ikhwan R	6	6	6	6	6	6	6	6	513	64,1 3	BAI K	L
		4	3	3	3	5	5	5	5				
9	Surahma	6	6	6	6	6	6	6	6	512	64,0	BAI	L



	n	3	3	3	3	5	5	5	5		0	K	
10	M. Nur Khafid	6 2	6 2	6 2	6 2	6 4	6 4	6 4	6 4	504	63,0 0	CKP	L
11	Moh. Yusup	6 0	6 0	6 0	6 0	6 5	6 5	6 5	6 5	482	60,2 5	SDG	L
12	Moh. Khoironi	6 2	6 2	6 2	6 2	6 5	6 5	6 5	6 5	508	63,5 0	CKP	L
13	Fitra Wijaya	6 0	6 0	6 0	6 0	6 5	6 5	6 5	6 5	500	62,5 0	CKP	L
14	Luthfi Ali M	6 1	6 1	6 1	6 1	6 5	6 5	6 5	6 5	504	63,0 0	CKP	L
15	Lasnuri Efendy	6 0	6 0	6 0	6 0	6 5	6 5	6 5	6 5	500	62,5 0	CKP	L
16	Abdul Ghofur	6 0	6 0	6 0	6 0	6 6	6 6	6 6	6 6	504	63,0 0	CKP	L

Tabel 4.11. daftar nilai pembelajaran

Dari tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa para peserta pelatihan memiliki kompetensi atau kemampuan yang cukup .oleh karena itu pelatihan sepeda motor A – 1 dapat dikatakan berhasil dalam mencetak lulusan yang baik.

#### 4.5.10 Evaluasi Belajar

Sihombing (2002:15) Evaluasi Belajar, adalah proses memberikan nilai terhadap hasil pendidikan dengan menggunakan alat yang dapat di pertanggung jawabkan (alat yang tepat). Sedangkan menurut Hamalik (2007:159) Evaluasi Hasil Belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang ingin dicapai oleh warga belajar setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dari pelatihan sepeda motor A- 1 tidak begitu saja dilepas oleh UPTD Liposos tetapi mereka diberikan modal dan dipantau kegiatan usahanya sehingga mereka tetap terkontrol oleh UPTD Liposos, bagi para peserta pelatihan yang sukses dan mampu mengembangkan usahanya maka akan dijadikan sebagai contoh atau panutan bagi peserta pelatihan yang berada di Liposos.

#### **4.6 Hambatan Atau Kendala Pelaksanaan Pendidikan Nonformal Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS)**

##### **4.6.1 Bagi Anak Jalanan**

- a. Ada beberapa materi yang kurang di pahami oleh para peserta pelatihan Otomotif A – 1 seperti bongkar pasang mesin dan juga tentang komponen – komponen yang ada di dalam mesin sepeda motor.
- b. Image masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan masih kental, bahwa anak jalanan itu sampah masyarakat, sumber masalah, susah diatur dan menyebabkan sulit mencari solusi bagi permasalahan yang ada, sehingga perhatian dan dukungan masyarakat tidak cukup untuk diandalkan, apalagi menurut pemahaman dari masyarakat lebih baik memperhatikan anak yatim atau anak yatim piatu yang jelas pahalanya dari pada mendukung anak jalanan, padahal jika benar – benar dipahami anjuran Kitab Suci Al – Qur'an dengan sebenarnya dan juga Undang – Undang Dasar 1945 juga jelas , maka nasib anak jalananpun juga patut untuk dipikirkan dan didukung.

##### **4.6.2 Bagi Lembaga**

- a. Kurangnya kerjasama antara pihak – pihak yang terkait yaitu Liposos, Dinas Sosial dan juga Pamong Praja.
- b. Tidak terorganisirnya anggaran untuk pelatihan.

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian dari observasi yang di bahas di dalam bab 4 , maka diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan kunci dan juga informan pendukung utama dan juga informan pendukung biasa dapat diketahui bahwa pendidikan nonformal yang diberikan kepada anak jalanan yaitu berupa pelatihan otomotif sepeda motor A - 1 yang diberikan oleh Dinas Sosial di Liposos untuk memberikan keterampilan kepada anak jalanan sehingga setelah mereka mendapatkan pendidikan nonformal yang berupa pelatihan otomotif A - 1 mereka dapat mandiri hidup di dalam masyarakat dan tidak kembali ke jalanan lagi, karena apa yang mereka dapatkan dalam pelatihan tersebut dapat memberikan suatu pemikiran dalam menggali kehidupan yang lebih baik.

Dari hasil wawancara maka diketahui ada beberapa kendala – kendala yang dihadapi oleh anak jalanan dalam pelatihan otomotif A - 1, antara lain:

- a. Masih ada keterkaitan erat dengan orang tua berkenaan dengan tujuan orang tua yang tidak adil terhadap hak – hak anak dengan kata lain eksploitasi anak.
- b. Image masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan masih kental, bahwa anak jalanan itu sampah masyarakat, sumber masalah, susah diatur dan menyebabkan sulit mencari solusi bagi permasalahan yang ada, sehingga perhatian dan dukungan masyarakat tidak cukup untuk diandalkan, apalagi menurut pemahaman dari masyarakat lebih baik memperhatikan anak yatim atau anak yatim piatu yang jelas pahalanya dari pada mendukung anak jalanan, padahal jika benar – benar dipahami anjuran Kitab Suci Al – Qur'an dengan sebenarnya dan juga Undang – Undang Dasar 1945 juga jelas , maka nasib anak jalananpun juga patut untuk dipikirkan dan didukung.
- c. Kurangnya kerjasama antara pihak – pihak yang terkait yaitu Liposos, Dinas Sosial dan juga Pamong Praja.
- d. Tidak terorganisirnya anggaran untuk pelatihan.

Yang dihadapi oleh anak jalanan antara lain tentang pembongkaran mesin – mesin otomotif dan juga mengenai hal – hal lainnya, tetapi kebanyakan dari mereka sangat senang dengan adanya pelatihan otomotif ini dikarenakan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan bagi anak jalanan sehingga mereka dapat memanfaatkan untuk bertahan hidup.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember Tahun 2012, Maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

### **5.2.1 bagi Anak Jalanan**

Anak jalanan diharapkan mampu mengembangkan dan juga memanfaatkan ketrampilan atau pelatihan yang di dapat di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember.

### **5.2.2 bagi Tutor atau Pemateri**

Tutor hendaknya mampu memberikan penjelasan yang lebih terhadap anak jalanan yang kurang memahami materi yang disajikan dan juga pemateri diharapkan dapat membimbing anak jalanan sebaik mungkin.

### **5.2.3 bagi UPTD Liposos**

UPTD Liposos hendaknya lebih memperhatikan keberadaan anak jalanan setelah selesai mengikuti pelatihan.

### **1.2.1 bagi pemerintah**

Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan keberadaan anak jalanan dan mendukung serta memberikan bantuan dana terhadap pendidikan atau pelatihan yang diadakan untuk anak jalanan.



## DAFTAR BACAAN

- Sudjana S., S.Pd., M. Ed., phd. 2002 *Pendidikan Nonformal*. Bandung. Falah Production
- Sudjana SF, Djudju. (1983). *Pendidikan Nonformal (Wawasan-Sejarah-Azas)*, Theme, Bandung.
- Sudjana HD. 1991. *Pendidikan Luar Sekolah* . Bandung Nusantara Press
- Sudjana D. 2004. *Manajemen Program Pendidikan : Untuk Pendidikan Non Formal & Pengembangan SDM*. Bandung : Falah Production
- Sudjana djuju (2005) *metode dan teknik pembelajaran partisipatif*. Bandung: Nusantara press
- Kamil , Mustafa. 2009. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: CV Alfabeta
- Sihombing, Umberto. 2002. *pendidikan berbasis masyarakat*. Jakarta CV Multiguna.Falah Production
- Kamil, Mustafa. 2010. *Model Pendidikan Dan Pelatihan*. Bandung. CV Alfabeta
- Baharudin , M . Pd. I. *Teori Belajar Pembelajaran*. Jogjakarta. AR-Ruzz Media.
- Hamalik , Oemar. 2007 *Kurikulum Dan Pembelajaran* PT Bumi Aksara Jakarta.
- Arief, Armai, MA. *Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan*.
- Zein, Ahmad. 2011. *Problematika Pendidikan Luar Sekolah*. Universitas Jember.
- Masyud, Sulthon 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Lembaga Pengembangan Manajemen Dan Profesi Kependidikan (LPMPK)
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. 2012. Jember Universitas Press
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta; PT Renika Cipta
- Tim Penyusun Kamus . 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia .Depdikbud* . Balai Pustaka
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soeharto, B. 1993. *Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi-Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (Makalah-Skripsi-Tesis) Ilmu Sosial*. Bandung: Tarsito
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Reneka Cipta.

Arikunto, Suharsini. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, S dan Abdul Jabar, Cipi Safrudin. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoritik Bagi Praktisi Pensisikan)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Bungin, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

### **Peraturan Perundang – undangan**

Tim Penyusun. 2003. *UU RI No.23 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas*. Bandung :Citra Umbara

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jl. Raya Semarang - Demak Km. 8,5 Semarang: CV. Aneka Ilmu, anggota IKAPI Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

### **Internet**

Hidayat , Nur. 2006. *Kurikulum Pelatihan Kerja (serial online)*.  
[http://www.PelatihanKerja.co.id/info/htmRaoijackers,1992,CaraBelajar di Perguruan tinggi](http://www.PelatihanKerja.co.id/info/htmRaoijackers,1992,CaraBelajardiPerguruantinggi).

Sudjana 2005 *Strategi Pendidikan Luar Sekolah (serial online)* [http://spupe 07. Word press. Com/2011/09/13](http://spupe07.Wordpress.Com/2011/09/13)

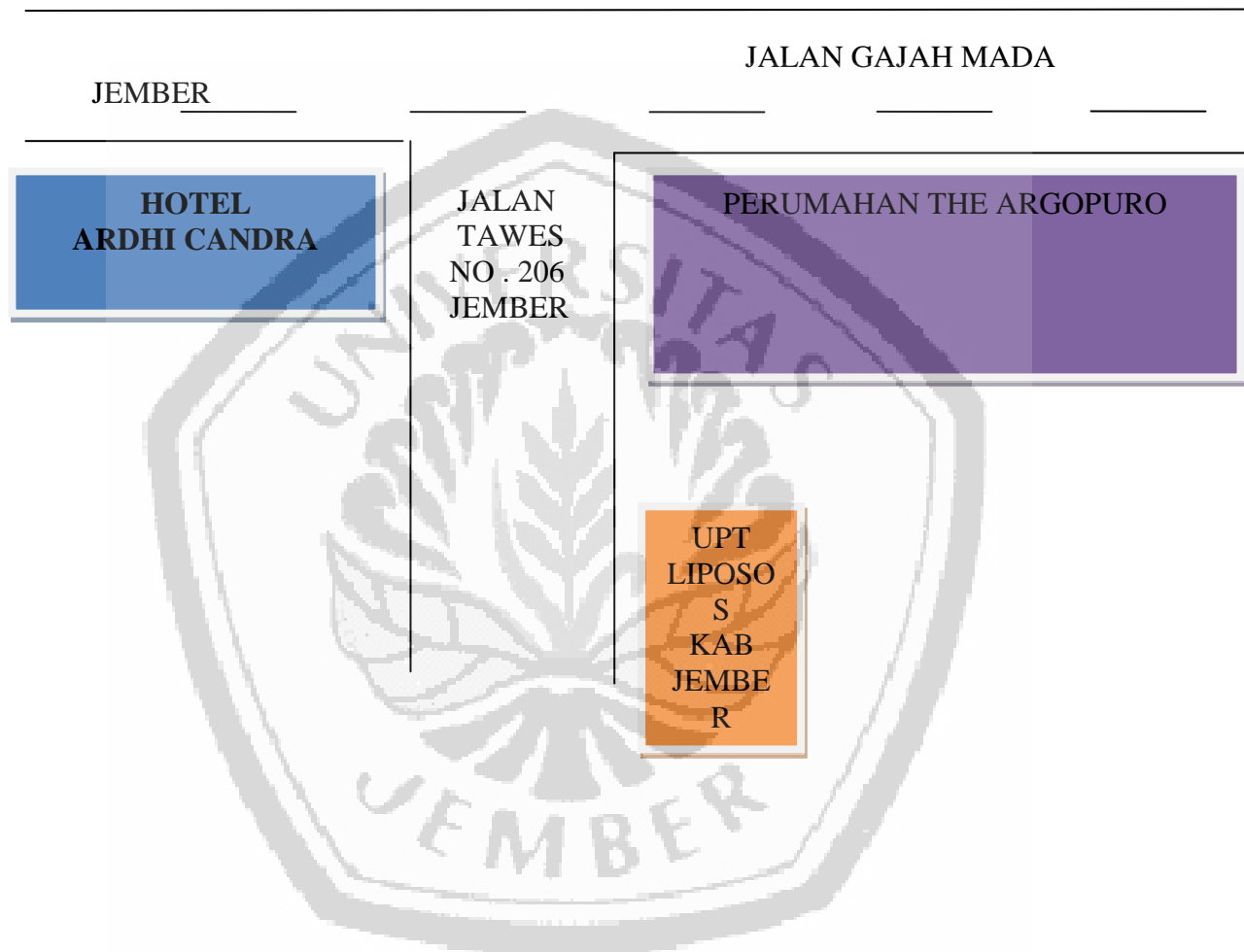
Lampiran A

**MATRIK PENELITIAN**

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Kabupaten Jember Tahun 2012	Bagaimana pelaksanaan pendidikan anak jalanan di lingkungan Pondok Sosial Kabupaten (LIPOSOS) Kabupaten Jember?	Pendidikan Anak Jalanan di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember (Pendidikan Nonformal)	10 patokan dikmas yaitu: 1. Sumber belajar 2. Warga belajar 3. Panti belajar 4. Ragi belajar 5. Dana belajar 6. Kelompok belajar 7. Program belajar 8. Proses belajar 9. Hasil belajar 10. Evaluasi belajar	1. Informan : a) Informan kunci: Pengelola LIPOSOS b) Informan pendukung : 1) Anak jalanan 2) Staf / karyawan LIPOSOS 3) Staf dinas Sosial 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Penentuan daerah penelitian: metode purposive di LIPOSOS Kabupaten Jember 2. Penentuan informan : Purposive Berdasarkan kriteria yang ditentukan 3. Pendekatan Penelitian : kualitatif 4. Pengumpulan data : a. Wawancara b. Observasi c. dokumentasi 5. Analisis data : Deskriptif Kualitatif



DENAH LOKASI LINGKUNGAN PONDOK SOSIAL



## INSTRUMEN PENELITIAN

### Pedoman Observasi

NO	Data Yang Akan Diraih	Sumber Data
1.	Kondisi Umum LIPOSOS	Informan pendukung
2.	Kondisi Sarana dan Prasarana di LIPOSOS	Informan kunci dan Informan pendukung
3.	Proses Kegiatan Pembelajaran di LIPOSOS	Informan kunci dan Informan pendukung

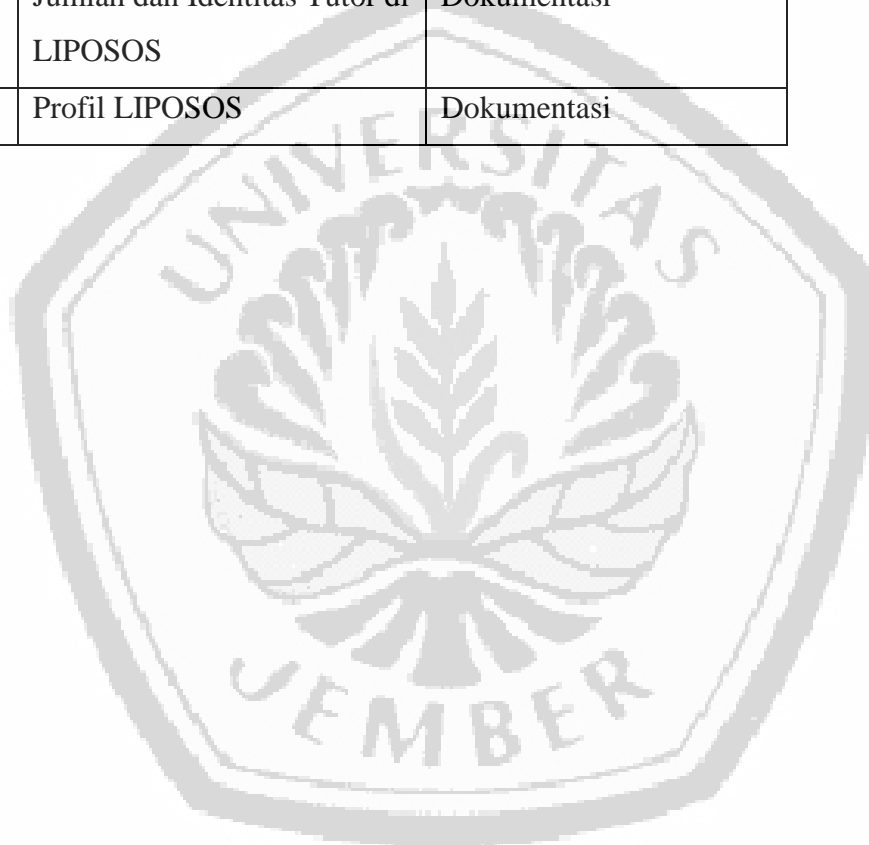
### Pedoman Wawancara

NO	Data Yang Akan Diraih	Sumber Data
1.	Sejarah singkat berdirinya LIPOSOS	Informan pendukung
2.	Bentuk /model pendidikan di LIPOSOS	Informan kunci dan Informan pendukung
3.	Proses pendidikan dan keterampilan	Informan Kunci
4.	Proses rekrutmen pada program Belajar nonformal di LIPOSOS	Informan Kunci
5.	Output program pendidikan di LIPOSOS	Informan Kunci

### Pedoman Dokumentasi

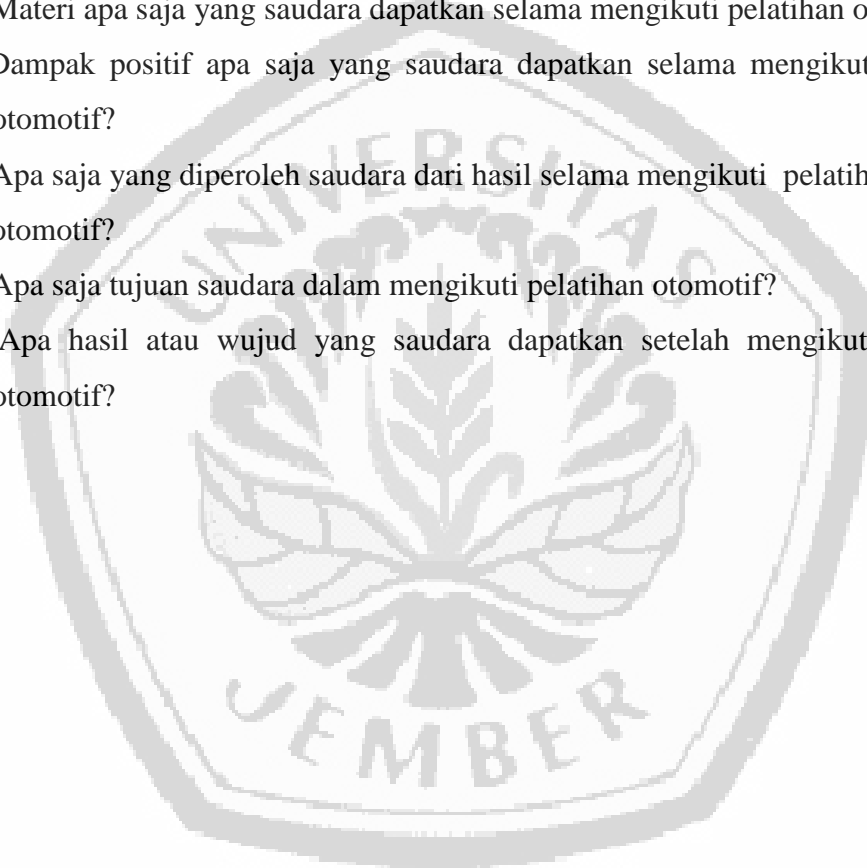
NO	Data Yang Akan Diraih	Sumber Data
1.	Sejarah berdirinya LIPOSOS	Dokumentasi
2.	Tugas dan fungsi LIPOSOS	Dokumentasi
3.	Program kegiatan LIPOSOS	Dokumentasi

4.	Jadwal Kegiatan Ketrampilan Otomotif	Dokumentasi
5.	Sarana Prasarana LIPOSOS	Dokumentasi
6.	Struktur Organisasi Dinas Dinas Sosial	Dokumentasi
7.	Denah Ruang LIPOSOS	Dokumentasi
8.	Tata Tertib LIPOSOS	Dokumentasi
9.	Jumlah dan Identitas Tutor di LIPOSOS	Dokumentasi
10.	Profil LIPOSOS	Dokumentasi



## **PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG**

1. Apa yang menjadi motivasi saudara sehingga mau mengikuti pelatihan otomotif yang diadakan oleh UPT Liposos?
2. Apa yang saudara dapatkan selama mengikuti pelatihan otomotif?
3. Berapa waktu yang dibutuhkan saudara selama mengikuti pelatihan otomotif?
4. Kendala apa saja yang saudara hadapi selama mengikuti pelatihan otomotif?
5. Materi apa saja yang saudara dapatkan selama mengikuti pelatihan otomotif?
6. Dampak positif apa saja yang saudara dapatkan selama mengikuti pelatihan otomotif?
7. Apa saja yang diperoleh saudara dari hasil selama mengikuti pelatihan otomotif?
8. Apa saja tujuan saudara dalam mengikuti pelatihan otomotif?
9. Apa hasil atau wujud yang saudara dapatkan setelah mengikuti pelatihan otomotif?



## **PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI**

1. Apa saja yang menjadi sumber belajar dalam pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
2. Siapa saja yang menjadi warga belajar dalam pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
3. Dimana tempat atau panti belajar yang menjadi tempat pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
4. Apa saja yang menjadi materi belajar dalam pelaksanaan pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
5. Berasal dari manakah dana belajar dalam pelaksanaan pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
6. Ada berapa kelompok belajar dalam pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
7. Program apa saja yang digunakan dalam pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
8. Bagaimana proses belajar dalam pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
9. Bagaimana hasil dari pelatihan otomotif bagi anak jalanan?
10. Seperti apa evaluasi belajar yang dilakukan Oleh Dinas Sosial terhadap peserta pelatihan yang berada di Liposos?

**JAWABAN DARI INFORMAN PENDUKUNG MENGENAI PELAKSANAAN  
PELATIHAN OTOMOTIF DI UPT LIPOSOS KABUPATEN JEMBER**

1. **APA YANG MENJADI MOTIVASI ANDA MAU MENGIKUTI PELATIHAN OTOMOTIF YANG DIADAKAN OLEH UPT LIPOSOS ?**

Jawaban :

Jamsari Jl. Manggis RT.01 RW.01 Wuluhan Jember = Adanya keinginan saya untuk memperdalam ilmu tentang otomotif, ingin memperkaya ilmu mengenai otomotif sepeda seperti mengenai bongkar pasang mesin, mengenai komponen – komponen yang ada di dalam otomotif sepeda.

2. **APA YANG ANDA DAPATKAN SELAMA MENGIKUTI PELATIHAN OTOMOTIF ?** Jawaban :

Bambang Wahyudi Jl. Kalimantan X 84 Bondowoso = Ilmu tentang kedisiplinan dan juga ilmu mengenai keagamaan sehingga dapat membentuk karakter setiap individu tetapi yang paling utama ilmu mengenai otomotif dan juga komponen – komponen yang ada di dalam mesin sepeda.

3. **BERAPA WAKTU YANG DIBUTUHKAN UNTUK PELATIHAN OTOMOTIF ?**

Jawaban :

Aria Dwi Novanto Jl. Kalimantan Gg.Kelinci 12 Jember = untuk masa pelatihan waktu yang dibutuhkan selama satu bulan dari pembukaan pelatihan sampai penutupan dengan rincian materi 30 % teori dan 70 % praktek

4. **KENDALA APA SAJA YANG ANDA HADAPI SELAMA MENGIKUTI PELATIHAN OTOMOTIF ?**

Jawaban :

Sona Eka Candra RT 01 RW 01 Ajung Jember = Macam – macam kendala yang saya hadapi yaitu mengenai bongkar pasang mesin, rangkaian listrik yang ada di dalam komponen mesin dan hal – hal yang agak rumit dalam bidang otomotif.

5. MATERI APA SAJA YANG ANDA DAPAT SELAMA MENGIKUTI PELATIHAN OTOMOTIF ?

Jawaban :

Lasnuri Efendy Jl. Melati No. 10 Kaliwates Jember = FMD = Fisik, Mental dan Disiplin

KWH = Kewirausahaan

KELOMPOK UNIT KOMPETENSI INTI

T.PPAU = Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Ukur

T.MKS = Melepas Kepala Silinder

T.MKSMT = Merakit Kepala Silinder memeriksa toleransi dan melaksanakan pengujian yang sesuai

T.OHE = Over Haul Engine

T.MBE = Merakit Blok Engine memeriksa toleransi dan melaksanakan pengujian yang sesuai

T.OHKR = Over Haul Karburator

T.OHKP = Over Haul Kopling

T.OHT = Over Haul Transmisi

Over Unit Final Drive

Over Haul Rem

Perbaikan Sistem Stater dan Pengisian

Perbaikan Pengapian

6. APA SAJA DAMPAK POSITIF DARI DIADAKANYA PELATIHAN OTOMOTIF ?

Jawaban :

Jamsari Jl. Manggis RT.01 RW.01 Wuluhan Jember = dampak positif yang dapat saya ambil dengan ada pelatihan otomotif ini yaitu dapat menjadi keterampilan bagi saya dan juga dapat digunakan untuk bekerja di bengkel – bengkel dan jika mempunyai modal maka saya bisa buka bengkel sendiri.

7. APAKAH ANDA DAPAT MEMANFAATKAN HASIL YANG DI DAPAT SELAMA PELATIHAN OTOMOTIF ?

Jawaban :

Bambang Wahyudi Jl. Kalimantan X 84 Bondowoso = Tentu saja dapat saya manfaatkan untuk kehidupan sebagai penghasilan.

8. APA YANG MENJADI TUJUAN ANDA DALAM MENGIKUTI PELATIHAN OTOMOTIF ?

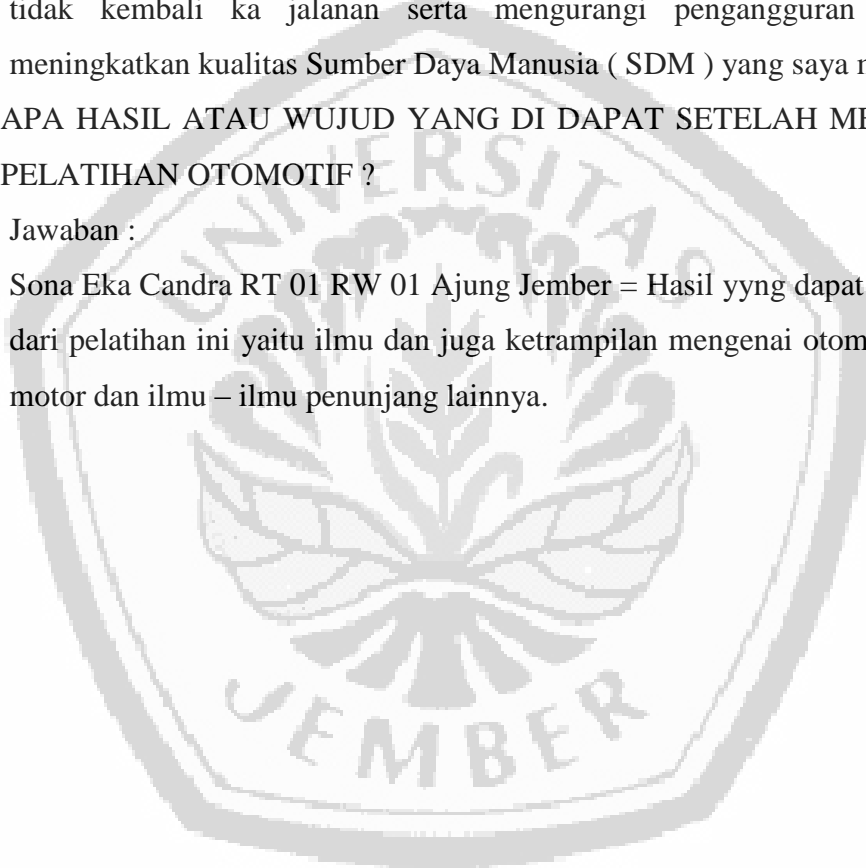
Jawaban :

Aria Dwi Novanto Jl. Kalimantan Gg.Kelinci 12 Jember =Tujuan saya dalam mengikuti pelatihan ini yaitu untuk mendapatkan ketrampilan ,dan jug agar tidak kembali ka jalanan serta mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang saya miliki.

9. APA HASIL ATAU WUJUD YANG DI DAPAT SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN OTOMOTIF ?

Jawaban :

Sona Eka Candra RT 01 RW 01 Ajung Jember = Hasil yng dapat saya ambil dari pelatihan ini yaitu ilmu dan juga ketrampilan mengenai otomotif sepeda motor dan ilmu – ilmu penunjang lainnya.





## FOTO



Foto 1.2. Foto di depan LIPOSOS







Foto 1.4 Foto saat praktek bongkar awal





Foto 1.5 Foto saat checking alat

